



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



DINAS KESEHATAN  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2021-2026

KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2021

Jl. M. Natsir No. 2 Simpang Empat ☎ / fax (0753) 7464101



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantiknya Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 2

Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.

#### Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

#### Pasal 4

Sistematika Renstra PD Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VII PENUTUP

#### Pasal 5

(1) Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- a.a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- a.b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- a.c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- a.d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- a.e. Rumah Sakit Umum Daerah;
- a.f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- a.g. Kecamatan.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 24 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

**DAFTAR ISI**

|   | <b>Hal</b> |
|---|------------|
| <b>DAFTAR ISI</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR BAGAN</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 4          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 5          |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN .....</b>                                | <b>8</b>   |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....                                       | 8          |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan .....   | 27         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .....   | 58         |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....                                | 70         |
| <b>BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>                 | <b>74</b>  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi .....                      | 74         |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih .....                      | 81         |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas Kesehatan ....            | 83         |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis..... | 85         |
| 3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis .....  | 86         |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN.....</b>                                 | <b>90</b>  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....                          | 90         |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>   | <b>93</b>  |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>                      | <b>96</b>  |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                            | <b>104</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP.....</b>  | <b>105</b> |

**DAFTAR BAGAN**

|  | <b>Hal</b> |
|--|------------|
| Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat..... | 26         |

**DAFTAR GRAFIK**

|  | <b>Hal</b> |
|--|------------|
| Grafik 3.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2012-2020..... | 71         |

## DAFTAR TABEL

|              |  | <b>Hal</b> |
|--------------|--|------------|
| Tabel 2.1    | Data SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan UPTD berdasarkan Golongan Tahun 2020.....   | 27         |
| Tabel 2.2    | Data SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan UPTD berdasarkan Jabatan Tahun 2020.....  | 28         |
| Tabel 2.3    | Data SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan UPTD berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....   | 29         |
| Tabel 2.4    | Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018-2020.....   | 31         |
| Tabel 2.5    | SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....   | 32         |
| Tabel 2.6    | Distribusi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan UPTD berdasarkan Pendidikan Tahun 2020.....   | 35         |
| Tabel 2.7    | Daftar Aset Tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.....  | 53         |
| Tabel 2.8    | Sarana Kesehatan Di Puskesmas Tahun 2020.....  | 54         |
| Tabel 2.9    | Sarana Kesehatan Pemerintah lainnya Tahun 2020.....  | 56         |
| Tabel 2.10   | Sarana Kesehatan Swasta Tahun 2020.....  | 56         |
| Tabel 2.11   | Sarana Kesehatan Pemerintah Berdasarkan Tempat Tidur, BOR, ALOS Tahun 2020   | 57         |
| Tabel T-C.23 | Pencapaian Kinerja Pelayanan sesuai SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016- 2021.....  | 59         |
| Tabel T-C.23 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016- 2021.....   | 66         |
| Tabel T-C.24 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020.....  | 68         |
| Tabel 2.11   | Analisis SWOT.....   | 71         |
| Tabel 3.1    | Pemetaan Permasalahan Bidang Kesehatan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kesehatan.....   | 76         |
| Tabel 3.2    | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat dengan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.....   | 83         |
| Tabel 3.3    | Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..... | 84         |
| Tabel 3.4    | Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....             | 85         |
| Tabel 3.5    | Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026.....   | 86         |
| Tabel 3.6    | Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal).....   | 88         |
| Tabel T-C.25 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Pasaman Barat Tahun 2021-2026.....  | 91         |
| Tabel T-C.26 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.....  | 93         |
| Tabel T-C.27 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasaman Barat.....   | 97         |
| Tabel T-C.28 | Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.....                      | 104        |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5 tahun, yang disusun sebagai arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada Rencana Strategis dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Renstra dan Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan daerah, baik dalam lingkup Provinsi sampai dengan Kabupaten. Sasaran dan indikator dari Kemenkes juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten 2021-2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Perumusan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung dan mewujudkan Misi Bupati

Pasaman Barat yaitu Misi 2: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing.

Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan dalam usaha mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah disepakati dan akan dijadikan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati Pasaman Barat dan masyarakat Pasaman Barat. Renstra juga menjadi acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/V/2008 tentang Juknis Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan rencana strategis ini dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan UPT-nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga tujuan pembangunan kesehatan Pasaman Barat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- a. Sebagai pedoman atau acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan UPT-nya.
- c. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya.
- d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (*Stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 : *Latar Belakang*

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra dan keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 : *Landasan Hukum*

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan.

1.3 : *Maksud dan Tujuan*

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan.

1.4 : *Sistematika Penulisan*

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kesehatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

- 2.1 : *Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan*  
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kesehatan, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Kesehatan, SOTK serta uraian organisasi, jumlah personil dan tata laksana Dinas Kesehatan.
- 2.2 : *Sumber Daya Dinas Kesehatan*  
Berisi penjelasan ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia, aset/modal, dan unit yang masih operasional).
- 2.3 : *Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan*  
Memuat capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan target/sasaran Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan, dan atau indikator lainnya.
- 2.4 : *Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan*  
Mengemukakan hasil analisis Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah, analisis KLHS, macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan.
- BAB III : PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN**
- 3.1 : *Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan*  
Memuat permasalahan pelayanan dan faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 : *Telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih*  
Memuat tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terkait visi dan misi kepala daerah, identifikasi pelayanan dan faktor pendukung serta penghambatnya yang dijadikan dasar perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan
- 3.3 : *Telaahan Renstra*  
Memuat faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah atau dari renstra kabupaten.

- 3.4 : *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*  
Memuat faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau implikasi rencana tata ruang wilayah dan KLHS.
- 3.5 : *Penentuan Isu Strategis*  
Memuat isu strategis dan isu yang akan ditangani melalui renstra tahun rencana.
- BAB IV : TUJUAN dan SASARAN**
- 4.1 : *Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan*  
Mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kerjanya.
- BAB V : STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN**  
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun yang akan datang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN serta PENDANAAN**  
Mengemukakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan**

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dibuat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja di Kabupaten Pasaman Barat, Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 11 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin Kepala Dinas yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang urusan kesehatan, meliputi bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga serta pelayanan kesehatan
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1. Kepala Dinas**

Rincian tugas Kepala Dinas :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang kesehatan.
- b. Memberikan data dan informasi mengenai situasi di bidang Kesehatan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

- c. Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang kesehatan.
- d. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Kepala Daerah.
- e. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas.
- f. Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional.
- i. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### A. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas-tugas pelayanan administratif dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang urusan kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang urusan kesehatan meliputi urusan bidang
- d. Layanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, serta pelayanan kesehatan.
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat Dinas terdiri dari sub bagian :

1. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
  - a. Merencanakan pembuatan DPA sesuai dengan ketentuan berlaku untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan.
  - b. Mengumpulkan bahan dan data yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan dan program kerja.
  - c. Menyiapkan pedoman dan petunjuk penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan perencanaan.
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja badan.
  - e. Membuat rencana dan program kerja perencanaan dan pelaporan.
  - f. Memeriksa hasil laporan dari seluruh UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
  - g. Merencanakan penyusunan naskah akademis kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan (membuat profil Dinas Kesehatan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan.
  - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan kegiatan
  - i. Membina hubungan dengan masyarakat dan memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sub bagian Program, Informasi dan Humas sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
    - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan bidang tugas
    - b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan keuangan dan pengelolaan aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
    - c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan keuangan dan pengelolaan aset
    - d. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    - e. Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja dinas sesuai dengan usulan masing-masing bidang.
    - f. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinas.
    - g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan, pengelola keuangan dan pengelola aset dinas.
    - h. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dan aset dinas.
    - i. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
  3. Sub Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum:
    - a. Merencanakan kegiatan sub bagian urusan umum, perlengkapan, kepegawaian sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
    - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan untuk pengelolaan surat menyurat, tata kearsipan, dan penggandaan untuk ketertiban administrasi.
    - c. Membimbing dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, daftar urut kepangkatan, cuti, pembinaan karir,

pemberhentian/pensiun pegawai, usulan formasi pegawai untuk mencapai profesionalisme.

- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, protokoler, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- e. Penyiapan bahan-bahan penyusunan produk hukum di bidang kesehatan
- f. Menyiapkan data dan bahan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum sesuai prosedur yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

## B. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- e. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Kesehatan Masyarakat secara rinci dan jelas guna memudahkan operasionalisasi dan penyelenggaraan lebih lanjut.

- f. Menyiapkan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah daerah yang berupa peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan kepala dinas kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memberikan usulan dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah.
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Uraian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat:
  - a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan gizi.
  - b. Memantau pertumbuhan balita dan status gizi melalui penimbangan di posyandu.
  - c. Menyelenggarakan pemberian makanan tambahan pendamping (MP-ASI) dan Ibu Hamil Kekurangan Energi Protein (Bumil KEK).
  - d. Melakukan pelacakan, pencatatan, pelaporan kasus gizi buruk
  - e. Menanggulangi anemia gizi terhadap ibu hamil, anemia dan KEK dengan pendistribusian tablet Fe.
  - f. Melaksanakan pendistribusian dan pemantauan kapsul vitamin A.
  - g. Melakukan penyuluhan mengenai vitamin A.
  - h. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pemantauan garam beryodium di tingkat rumah tangga.
  - i. Menyiapkan bahan dan pedoman standar pelayanan kesehatan ibu.
  - j. Menyiapkan bahan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi, balita, dan pra sekolah.
  - k. Menyiapkan bahan pedoman standar pelayanan kesehatan anak.
  - l. Menyediakan ketersediaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di kabupaten.

- m. Melakukan penyuluhan terhadap pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas balita.
  - n. Melakukan pemantauan pelaksanaan posyandu, kelas ibu hamil, dan pemasangan P4K.
  - o. Menganalisa hasil kegiatan setiap tahun dan merencanakan tentang strategi penanggulangan kematian ibu.
  - p. Mengevaluasi hasil audit perinatal.
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat; mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat. Uraian tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat:
- a. Mengumpulkan data dalam kelompok upaya kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat seperti posyandu.
  - b. Menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bidang tersebut.
  - c. Menyusun program pengembangan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan tersebut.
  - d. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan operasional desa siaga aktif sesuai dengan standar yang berlaku untuk terbentuknya desa siaga aktif.
  - e. Menyusun dan merencanakan kegiatan pengembangan pos kesehatan pesantren (Poskestren) dalam pengaderan santriawan dan santriati di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat.
  - f. Melaksanakan upaya pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan program tersebut.

- g. Merencanakan pelaksanaan kegiatan media informasi dalam pengembangan transformasi kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.
  - h. Membina kegiatan pramuka dalam kesakaan bakti husada sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terpantaunya pelaksanaan kegiatan tersebut.
  - i. Merumuskan dan menyusun manajemen peran serta masyarakat melalui profil upaya kesehatan berbasis masyarakat dan kemitraan lintas sektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.
  - j. Melaksanakan penyuluhan kesehatan komunitas.
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, kesehatan kerja dan olahraga. uraian tugas seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga:
- a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan di bidang penyehatan lingkungan.
  - b. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan penyakit berbasis lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan dibidang penyehatan lingkungan.
  - c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka melaksanakan pemantauan lingkungan pemukiman (PLP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
  - d. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka melaksanakan penyehatan air dan limbah rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- e. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis dan pengawasan terhadap tempat-tempat umum, tempat pembuatan pestisida dan TPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- f. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga yang dilaksanakan di tingkat Puskesmas.
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

### C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan uraian pekerjaan :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- e. Menyiapkan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah daerah yang berupa peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan kepala dinas kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memberikan usulan dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit baik secara lisan maupun tertulis.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi, uraian tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi:

- a. Melakukan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pengembangan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit, surveilans kesehatan haji, penanggulangan KLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi surveilans dan imunisasi.
  - b. Menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi surveilans dan imunisasi.
  - c. Melakukan evaluasi data serta hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi surveilans dan imunisasi.
  - d. Melakukan pemantauan, pengamatan faktor resiko suatu penyakit, penanggulangan KLB dan penanggulangan bencana sesuai SOP untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi surveilans dan imunisasi.
  - e. Menyediakan informasi, penanggulangan krisis akibat bencana yang cepat, tepat akurat dan sesuai kebutuhan, baik tahap pra, saat dan pasca bencana, dan informasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi surveilans dan imunisasi.
  - f. Menyiapkan dan mendistribusikan logistik yang dibutuhkan untuk daerah bencana berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi surveilans dan imunisasi.
  - g. Memperoleh data kesehatan haji untuk pemeliharaan, pembinaan, perlindungan serta rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji serta diwujudkan ke dalam pencatatan serta kelengkapan dalam Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH).
  - h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas pada atasan.
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular:
- a. Menyiapkan bahan dan data penyakit menular sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

- b. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penyelenggaraan kegiatan.
  - c. Melakukan upaya penanggulangan penyakit menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban tugas pada atasan.
  - e. Mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa
- a. Menyiapkan bahan dan data penyakit tidak menular sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
  - b. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penyelenggaraan kegiatan.
  - c. Melakukan upaya penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban tugas pada atasan.
  - e. Mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
  - f. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat.

#### D. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional
- e. Menyiapkan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah daerah yang berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan kepala dinas kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memberikan usulan dan saran kepada atasan melalui telahaan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pembinaan tenaga kesehatan baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala dinas kesehatan melalui sekretaris.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi seksi:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer. Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer:
  - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pelayanan kesehatan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan dasar serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer.
  - d. Menyelenggarakan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, dan rawan.
  - e. Melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan medik dasar/kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
  - f. Melakukan pendampingan dan menyiapkan akreditasi Puskesmas.
  - g. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan.
  - h. Membimbing pelaksanaan pelayanan keperawatan yang meliputi bina pelayanan keperawatan keluarga dan masyarakat.
  - i. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan. Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan:
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  - b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan peningkatan pelayanan, fasilitas dan mutu pelayanan rujukan.
  - c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder.
  - d. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan program JKN.
  - e. Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- f. Melakukan evaluasi klaim Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik itu tentang pelayanan dasar, rujukan, rawat inap dan persalinan di pelayanan tingkat pertama.
  - g. Menvalidasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap 6 bulan sekali.
  - h. Menyiapkan konsep kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.
  - i. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  - j. Melaporkan laporan keuangan kepada atasan langsung berdasarkan tugas yang dilaksanakan.
  - k. Melakukan verifikasi lapangan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan kebenaran klaim pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  - l. Mengkoordinasikan pembelian obat dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan kebenaran klaim pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  - m. Menginformasikan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) SK Luncuran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
  - n. Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari dana kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
  - o. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat.
  - p. Melaksanakan pengawasan pusat kesehatan dasar dan rujukan.
  - q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan standar operasional dan prosedur pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
  - r. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional. Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional:

- a. Menyiapkan bahan perumusan program, dan perencanaan peningkatan pelayanan, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional
- b. Meregistrasi sarana kesehatan tradisional yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional.
- c. Mengeluarkan rekomendasi izin pelayanan kesehatan tradisional.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang dikeluarkan izin prakteknya.
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang dikeluarkan izinnya.
- f. Membuat rekapitulasi semua izin pelayanan kesehatan tradisional yang dikeluarkan.
- g. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.

#### E. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya.
- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

- g. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang sumber daya kesehatan secara rinci dan jelas guna memudahkan operasionalisasi dan penyelenggaraan lebih lanjut.
- h. Menyiapkan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah daerah yang berupa peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan kepala dinas kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Memberikan usulan dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang sumber daya kesehatan baik secara lisan maupun tertulis.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi :

1. Seksi Kefarmasian.

Uraian tugas Seksi Kefarmasian:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan kefarmasian.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pelayanan farmasi, komunitas, farmasi klinik dan kerjasama profesi.
- c. Melakukan pembinaan teknis dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan farmasi, komunitas, farmasi klinik dan kerjasama profesi.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penggunaan obat tradisional dan obat esensial nasional.
- e. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.
- f. Melakukan pembinaa, teknis, pengendalian dan evaluasi, produk simplisia obat asli Indonesia, UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional) dan UMOT (Usaha Menengah Obat Tradisional).
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya di bidang kefarmasian, makanan dan minuman serta kosmetika.
- h. Melaksanakan pengawasan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kefarmasian, rasionalisasi obat, makanan dan minuman dan perbekalan kesehatan.

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Uraian tugas Seksi Alat Kesehatan dan PKRT:

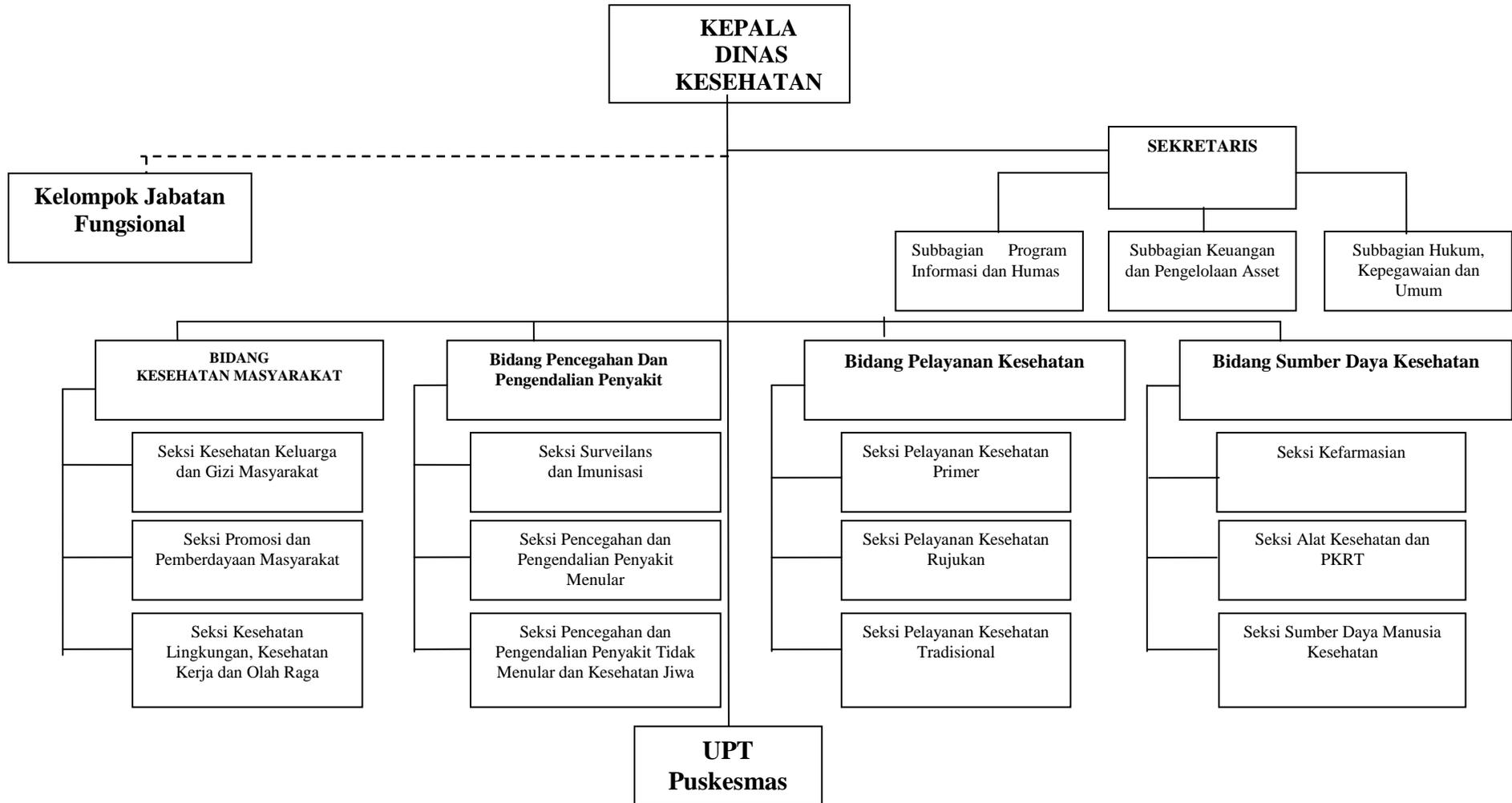
- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi pengadaan alat kesehatan dan PKRT ke lapangan.
  - b. Mencatat semua alat kesehatan yang telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan.
  - c. Melakukan pengelolaan terhadap alat kesehatan dan PKRT yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - d. Mengevaluasi laporan alat kesehatan dan PKRT sebagai pertanggung jawaban tugas pada atasan.
  - e. Melaksanakan pengadaan alat kesehatan dan PKRT sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Dinas Kesehatan.
  - f. Melakukan pengelolaan terhadap sarana pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan.
  - g. Melakukan penilaian terhadap kondisi alat kesehatan, untuk dilakukan pemeliharaan maupun penghapusan aset.
  - h. Melakukan persiapan untuk tempat alat kesehatan yang akan didistribusikan.
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Uraian tugas seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan:

- a. Mengelola dan update data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).
- b. Analisa data kebutuhan SDMK.
- c. Mengelola kebutuhan penyelenggaraan pendidikan lanjutan tenaga kesehatan.
- d. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan.
- e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
- f. Menerima berkas permohonan izin/tugas belajar, verifikasi dokumen kesesuaian ketentuan.
- g. Menyiapkan data-data jadwal dan tempat pelatihan.
- h. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- i. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pelatihan.

- j. Fasilitasi kelancaran pelaksanaan penelitian bidang kesehatan oleh individu/instansi setelah mendapat izin dari Pemda Kabupaten Pasaman Barat.
- k. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
- l. Menerima dan memeriksa kelengkapan syarat-syarat mengikuti pendidikan dan membuatkan rekomendasi seleksi/ mengikuti pendidikan yang ditandatangani oleh kepala dinas.

**Bagan 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Jumlah SDM di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 sebanyak 741 orang SDM yang aktif, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Data SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan UPTD**  
**berdasarkan Golongan Tahun 2020**

| No  | Unit Kerja                  | Golongan |     |    |   | Jumlah |
|-----|-----------------------------|----------|-----|----|---|--------|
|     |                             | IV       | III | II | I |        |
| I   | Dinas Kesehatan             | 5        | 64  | 8  | 0 | 77     |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten | 0        | 1   | 5  | 0 | 6      |
| III | UPT Puskesmas               |          |     |    |   |        |
| 1   | Puskesmas Air Bangis        | 1        | 13  | 9  | 0 | 23     |
| 2   | Puskesmas Silaping          | 0        | 27  | 12 | 0 | 39     |
| 3   | Puskesmas Desa Baru         | 0        | 13  | 7  | 0 | 20     |
| 4   | Puskesmas Parit             | 4        | 25  | 14 | 0 | 43     |
| 5   | Puskesmas Ujung Gading      | 1        | 34  | 9  | 0 | 44     |
| 6   | Puskesmas Ranah Salido      | 1        | 22  | 7  | 0 | 30     |
| 7   | Puskesmas Sungai Aur        | 2        | 44  | 12 | 0 | 58     |
| 8   | Puskesmas Paraman Ampalu    | 0        | 23  | 13 | 0 | 36     |
| 9   | Puskesmas Muaro Kiawai      | 1        | 13  | 3  | 0 | 17     |
| 10  | Puskesmas Aia Gadang        | 0        | 9   | 6  | 0 | 15     |
| 11  | Puskesmas Simpang Empat     | 3        | 23  | 10 | 0 | 36     |
| 12  | Puskesmas Sukamenanti       | 3        | 27  | 6  | 0 | 36     |
| 13  | Puskesmas Kajai             | 0        | 8   | 8  | 0 | 16     |
| 14  | Puskesmas Talu              | 0        | 26  | 10 | 1 | 37     |
| 15  | Puskesmas Lembah Binuang    | 2        | 11  | 8  | 0 | 21     |
| 16  | Puskesmas Sasak             | 0        | 10  | 9  | 0 | 19     |
| 17  | Puskesmas Ophir             | 2        | 27  | 22 | 0 | 51     |
| 18  | Puskesmas IV Koto Kinali    | 1        | 19  | 11 | 0 | 31     |
| 19  | Puskesmas Kinali            | 4        | 24  | 15 | 0 | 43     |

| No     | Unit Kerja                | Golongan |     |    |   | Jumlah |
|--------|---------------------------|----------|-----|----|---|--------|
|        |                           | IV       | III | II | I |        |
| 20     | Puskesmas VI Koto Selatan | 0        | 9   | 9  | 0 | 18     |
| IV     | RS Pratama Ujung Gading   | 0        | 15  | 8  | 0 | 23     |
| V      | UPT Labkesda              | 0        | 1   | 0  | 0 | 1      |
| Jumlah |                           |          |     |    |   | 741    |

Sumber: Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, jumlah SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang paling dominan berada dalam golongan III yaitu sebanyak 488 orang.

**Tabel 2.2**  
**Data SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan UPTD**  
**berdasarkan Jabatan Tahun 2020**

| No  | Unit Kerja                  | Jabatan   |            |           |                 |                     | Jumlah |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|---------------------|--------|
|     |                             | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Fungsional Umum | Fungsional Tertentu |        |
| I   | Dinas Kesehatan             | 1         | 5          | 15        | 55              | 1                   | 77     |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten | 0         | 0          | 2         | 3               | 1                   | 6      |
| III | UPT Dinas Kesehatan         |           |            |           |                 |                     |        |
| 1   | Puskesmas Air Bangis        | 0         | 0          | 2         | 0               | 21                  | 23     |
| 2   | Puskesmas Silaping          | 0         | 0          | 2         | 1               | 36                  | 39     |
| 3   | Puskesmas Desa Baru         | 0         | 0          | 2         | 0               | 18                  | 20     |
| 4   | Puskesmas Parit             | 0         | 0          | 2         | 1               | 37                  | 40     |
| 5   | Puskesmas Ujung Gading      | 0         | 0          | 2         | 2               | 39                  | 43     |
| 6   | Puskesmas Ranah Salido      | 0         | 0          | 2         | 0               | 29                  | 31     |
| 7   | Puskesmas Sungai Aur        | 0         | 0          | 2         | 2               | 54                  | 58     |
| 8   | Puskesmas Paraman Ampalu    | 0         | 0          | 2         | 1               | 33                  | 36     |
| 9   | Puskesmas Muaro Kiawai      | 0         | 0          | 2         | 0               | 15                  | 17     |
| 10  | Puskesmas Aia Gadang        | 0         | 0          | 2         | 1               | 14                  | 15     |
| 11  | Puskesmas Simpang Empat     | 0         | 0          | 2         | 3               | 31                  | 36     |
| 12  | Puskesmas Sukamenanti       | 0         | 0          | 2         | 2               | 32                  | 36     |
| 13  | Puskesmas Kajai             | 0         | 0          | 2         | 0               | 14                  | 16     |
| 14  | Puskesmas Talu              | 0         | 0          | 2         | 4               | 29                  | 35     |

| No     | Unit Kerja                | Jabatan   |            |           |                 |                     | Jumlah |
|--------|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|---------------------|--------|
|        |                           | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Fungsional Umum | Fungsional Tertentu |        |
| 15     | Puskesmas Lembah Binuang  | 0         | 0          | 2         | 0               | 19                  | 21     |
| 16     | Puskesmas Sasak           | 0         | 0          | 2         | 0               | 17                  | 19     |
| 17     | Puskesmas Ophir           | 0         | 0          | 2         | 0               | 49                  | 51     |
| 18     | Puskesmas IV Koto Kinali  | 0         | 0          | 2         | 1               | 28                  | 31     |
| 19     | Puskesmas Kinali          | 0         | 0          | 2         | 2               | 39                  | 43     |
| 20     | Puskesmas VI Koto Selatan | 0         | 0          | 2         | 0               | 16                  | 18     |
| IV     | RS Pratama Ujung Gading   | 0         | 0          | 0         | 0               | 23                  | 23     |
| V      | UPT Labkesda              | 0         | 0          | 0         | 0               | 1                   | 1      |
| Jumlah |                           |           |            |           |                 |                     | 741    |

Sumber: Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui jumlah SDM Dinas Kesehatan sebagai Pejabat Eselon yaitu 1 orang Eselon II, 5 orang Eselon III dan 57 orang Eselon IV. Untuk pejabat Eselon IV sebarannya adalah sebagai berikut 15 orang di Dinas Kesehatan, 2 orang di IFK dan 40 orang di Puskesmas. Untuk jabatan pelaksana/fungsional umum sebanyak 89 orang (55 orang di Dinas Kesehatan, 3 orang di IFK dan 31 orang di Puskesmas). Selain itu terdapat kelompok jabatan fungsional tertentu sebanyak 595 orang.

**Tabel 2.3**  
**Data SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan UPTD**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

| No  | Unit Kerja                  | Pendidikan |              |                  |      |       |     |     |     | Jumlah |
|-----|-----------------------------|------------|--------------|------------------|------|-------|-----|-----|-----|--------|
|     |                             | S2         | S1 Kesehatan | S1 Non Kesehatan | D IV | D III | D I | SMA | SMP |        |
| I   | Dinas Kesehatan             | 10         | 29           | 3                | 5    | 27    | 0   | 3   | 0   | 77     |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten | 1          | 3            | 0                | 0    | 1     | 0   | 1   | 0   | 6      |
| III | UPT Puskesmas               |            |              |                  |      |       |     |     |     |        |
| 1   | Puskesmas Air Bangis        | 0          | 5            | 0                | 3    | 12    | 0   | 2   | 0   | 22     |
| 2   | Puskesmas Silaping          | 1          | 8            | 0                | 2    | 26    | 0   | 2   | 0   | 39     |
| 3   | Puskesmas Desa Baru         | 0          | 3            | 0                | 3    | 14    | 0   | 0   | 0   | 20     |
| 4   | Puskesmas Parit             | 0          | 17           | 0                | 2    | 24    | 0   | 0   | 0   | 43     |

| No | Unit Kerja                | Pendidikan |              |                  |      |       |     |     |     | Jumlah |
|----|---------------------------|------------|--------------|------------------|------|-------|-----|-----|-----|--------|
|    |                           | S2         | S1 Kesehatan | S1 Non Kesehatan | D IV | D III | D I | SMA | SMP |        |
| 5  | Puskesmas Ujung Gading    | 0          | 9            | 0                | 1    | 33    | 0   | 1   | 0   | 44     |
| 6  | Puskesmas Ranah Salido    | 1          | 5            | 0                | 0    | 24    | 0   | 0   | 0   | 30     |
| 7  | Puskesmas Sungai Aur      | 1          | 19           | 1                | 7    | 28    | 0   | 2   | 0   | 58     |
| 8  | Puskesmas Paraman Ampalu  | 1          | 9            | 2                | 1    | 21    | 0   | 2   | 0   | 36     |
| 9  | Puskesmas Muaro Kiawai    | 0          | 6            | 1                | 2    | 8     | 0   | 0   | 0   | 17     |
| 10 | Puskesmas Aia Gadang      | 1          | 2            | 0                | 2    | 12    | 0   | 0   | 0   | 17     |
| 11 | Puskesmas Simpang Empat   | 1          | 3            | 0                | 6    | 19    | 4   | 3   | 0   | 36     |
| 12 | Puskesmas Sukamenanti     | 2          | 6            | 1                | 2    | 22    | 0   | 3   | 0   | 36     |
| 13 | Puskesmas Kajai           | 0          | 3            | 0                | 1    | 12    | 0   | 0   | 0   | 16     |
| 14 | Puskesmas Talu            | 0          | 6            | 0                | 3    | 25    | 0   | 3   | 0   | 37     |
| 15 | Puskesmas Lembah Binuang  | 0          | 6            | 0                | 3    | 12    | 0   | 0   | 0   | 21     |
| 16 | Puskesmas Sasak           | 1          | 4            | 0                | 5    | 9     | 0   | 0   | 0   | 19     |
| 17 | Puskesmas Ophir           | 1          | 7            | 0                | 1    | 42    | 0   | 0   | 0   | 51     |
| 18 | Puskesmas IV Koto Kinali  | 1          | 8            | 0                | 3    | 19    | 0   | 0   | 0   | 31     |
| 19 | Puskesmas Kinali          | 0          | 15           | 0                | 2    | 26    | 0   | 0   | 0   | 43     |
| 20 | Puskesmas VI Koto Selatan | 0          | 3            | 0                | 2    | 13    | 0   | 0   | 0   | 18     |
| IV | RS Pratama Ujung Gading   | 0          | 13           | 0                | 4    | 6     | 0   | 0   | 0   | 23     |
| V  | UPT Labkesda              | 0          | 0            | 0                | 1    | 0     | 0   | 0   | 0   | 1      |
|    | Jumlah                    | 22         | 189          | 8                | 61   | 435   | 4   | 22  | 0   | 741    |

Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Dari tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah SDM Dinas Kesehatan paling banyak berdasarkan tingkatan pendidikan adalah Diploma (DIII) sebanyak 435 orang tenaga.

**Tabel 2.4**  
**Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018-2020**

| No | Jenis Tenaga                     | Rasio terhadap 100.000 penduduk |         |         |
|----|----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
|    |                                  | 2018                            | 2019    | 2020    |
|    | Jumlah Penduduk                  | 435.612                         | 443.722 | 451.705 |
| 1  | Dokter Umum                      | 12,20                           | 12,60   | 15,90   |
| 2  | Dokter Spesialis                 | 11,20                           | 8,10    | 6,40    |
| 3  | Dokter Gigi                      | 3,90                            | 4,50    | 6,00    |
| 4  | Dokter Gigi Spesialis            | 0,00                            | 0,20    | 0,20    |
| 5  | Apoteker                         | 1,61                            | 5,20    | 5,31    |
| 6  | Perawat                          | 85,20                           | 96,00   | 108,50  |
| 7  | Bidan                            | 91,80                           | 121,00  | 122,60  |
| 8  | Kesehatan Masyarakat             | 7,60                            | 11,90   | 10,00   |
| 9  | Kesehatan Lingkungan             | 3,20                            | 6,80    | 3,30    |
| 10 | Perawat Gigi                     | 3,44                            | 3,38    | 2,88    |
| 11 | Gizi                             | 5,50                            | 8,30    | 6,40    |
| 12 | Asisten Apoteker                 | 6,43                            | 11,70   | 10,63   |
| 13 | Ahli Laboratorium Medik (Analis) | 7,60                            | 5,00    | 7,30    |
| 14 | Keterampilan Fisik               | 0,90                            | 0,90    | 1,10    |
| 15 | Keteknisian Medis                | 0,90                            | 1,10    | 0,70    |
| 16 | Radiografer                      | 1,61                            | 2,03    | 2,66    |
| 17 | Perekam Medis                    | 5,28                            | 10,14   | 8,86    |
| 18 | Refraksi Optisi                  | 1,61                            | 1,80    | 1,99    |

*Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020*

*Profil SDMK Kab. Pasaman Barat Tahun 2018-2020*

Berdasarkan tabel 2.4 di atas diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk masih belum memenuhi standar yang ada. Misalnya, untuk tenaga dokter umum sampai tahun 2020 masih belum memenuhi standar rasio dokter yang seharusnya yaitu 40 orang dokter umum per 100.000 penduduk. Demikian pula untuk tenaga perawat, seharusnya memenuhi rasio 117 orang perawat per 100.000 penduduk. Sementara untuk tenaga bidan pada tahun 2020 sudah melebihi rasio tenaga bidan yang seharusnya yaitu 100 bidan per 100.000 penduduk.

**Tabel 2.5**  
**SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

| No. | Bagian/ Bidang                                       | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|-----|--|----------------|------------|
| 1   | Kepala Dinas   | 1              | S2         |
| 2   | Sekretaris   | 1              | S1         |
| 3   | Sekretariat (Sub Bagian)                             |                |            |
| a.  | Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum        | 1              | S1         |
|     | Pengadministrasi Kepegawaian                         | 1              | S1         |
|     | Pengelola Kepegawaian                                | 2              | D3         |
|     | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor                | 2              | D3         |
|     | Pengemudi  | 1              | SMA        |
|     | Pengadministrasi Umum                                | 2              | SMA, D3    |
|     | Petugas Keamanan                                     | 1              | SMA        |
| b.  | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset      | 1              | S1         |
|     | Analisis Aplikasi Pengelola Data dan Sistem Keuangan | 1              | S1         |
|     | Analisis Pajak dan Retribusi daerah                  | 1              | D4         |
|     | Pengelola Gaji                                       | 1              | S1         |
|     | Bendahara  | 1              | D3         |
|     | Pengelola Barang Milik Negara                        | 2              | D3         |
| c.  | Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas       | 1              | S1         |
|     | Analisis Perencanaan Anggaran                        | 1              | S1         |
|     | Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan             | 1              | S1         |
| 4   | Bidang Sumber Daya Kesehatan                         |                |            |
| a.  | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan                  | 1              | S1         |
|     | Kepala Seksi SDM                                     | 1              | S1         |
|     | Analisis Kesehatan                                   | 1              | D3         |
| b.  | Kepala Seksi Kefarmasian                             | 1              | S1         |
|     | Analisis Kesehatan                                   | 1              | S1         |
|     | Pengelola Kefarmasian                                | 2              | D3         |
| c.  | Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT                 | 1              | D4         |
|     | Analisis Kesehatan                                   | 1              | S1         |
|     | Pengelola Alat Kesehatan                             | 1              | D3         |

| No. | Bagian/ Bidang   | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|-----|--|----------------|------------|
| 5   | Bidang Pelayanan Kesehatan                                     |                |            |
|     | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan                              | 1              | S2         |
| a.  | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer                        | 1              | S1         |
|     | Analisis Kesehatan   | 1              | S1         |
|     | Pengelola Pelayanan Kesehatan                                  | 1              | S1         |
|     | Pengelola Pelayanan Kesehatan                                  | 2              | D3         |
| b.  | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan | 1              | S2         |
|     | Analisis Pembayaran Jaminan kesehatan                          | 1              | S1         |
|     | Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan               | 1              | S1         |
|     | Pengolah Data Seksi PRJK                                       | 1              | D3         |
| c.  | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional                   | 1              | S1         |
|     | Analisis Kesehatan   | 1              | S1         |
|     | Pengelola Pelayanan Kesehatan                                  | 1              | S1         |
| 6   | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit                    |                |            |
|     | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit             | 1              | S2         |
| a.  | Kepala Seksi P2P Menular                                       | 1              | S2         |
|     | Analisis Penyakit Menular                                      | 1              | S1         |
|     | Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular langsung              | 2              | S1         |
|     | Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang            | 1              | D3         |
| b.  | Kepala Seksi P2P Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa              | 1              | D3         |
|     | Analisis Kesehatan   | 1              | S1         |
|     | Pengelola Penyakit Tidak Menular                               | 1              | D3         |
| c.  | Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi                          | 1              | S1         |
|     | Analisis Kesehatan   | 1              | S2         |
|     | Pengelola Pengamatan Penyakit Dan Imunisasi                    | 1              | S1         |
|     | Pengelola Program Imunisasi                                    | 1              | D4         |

| No. | Bagian/ Bidang  | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|-----|---|----------------|------------|
| 7   | Bidang Kesehatan Masyarakat                                     |                |            |
|     | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat                              | 1              | S2         |
| a.  | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat             | 1              | S1         |
|     | Analisis Kesehatan Ibu dan Anak                                 | 2              | S1         |
|     | Pengelola Program Kesehatan Keluarga                            | 2              | D3         |
|     | Analisis Gizi   | 1              | S1         |
|     | Pengelola Program Gizi  | 2              | S1         |
| b.  | Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan                 | 1              | S1         |
|     | Analisis Kesehatan  | 1              | S1         |
|     | Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat                      | 1              | D3         |
| c.  | Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1              | S2         |
|     | Analisis Kesehatan Kerja  | 1              | S1         |
|     | Pemeriksa Sanitasi  | 1              | D4         |
|     | Pengelola Penyehatan lingkungan                                 | 1              | D3         |

Sumber: Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat mayoritas memiliki tingkat pendidikan S1. Hal ini disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.

**Tabel 2.6**  
**Distribusi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan UPTD**  
**berdasarkan Pendidikan Tahun 2020**

| No  | Unit Kerja                  | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |                 |         |           |             |                       |
|-----|-----------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|
|     |                             | Dokter                 |            |           |             |                       | Dokter Gigi     |         |           |             |                       |
|     |                             | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|     |                             | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN             | Non ASN |           |             |                       |
| I   | Dinas Kesehatan             |                        |            |           | 0           |                       |                 |         |           | 0           |                       |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten |                        |            |           | 0           |                       |                 |         |           | 0           |                       |
| III | UPT Dinas Kesehatan         |                        |            |           | 0           |                       |                 |         |           | 0           |                       |
| 1   | Puskesmas Air Bangis        | 0                      | 2          | 2         | -2          | K                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 2   | Puskesmas Silaping          | 2                      | 0          | 2         | 0           | S                     | 0               | 1       | 1         | 0           | S                     |
| 3   | Puskesmas Desa Baru         | 1                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0               | 1       | 1         | 0           | S                     |
| 4   | Puskesmas Parit             | 3                      | 0          | 3         | 0           | S                     | 2               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 5   | Puskesmas Ujung Gading      | 2                      | 0          | 2         | 0           | S                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 6   | Puskesmas Ranah Salido      | 2                      | 0          | 2         | 0           | S                     | 1               | 1       | 2         | 0           | S                     |
| 7   | Puskesmas Sungai Aur        | 2                      | 0          | 3         | -1          | S                     | 2               | 0       | 1         | +1          | L                     |
| 8   | Puskesmas Paraman Ampalu    | 1                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 9   | Puskesmas Muaro Kiawai      | 2                      | 0          | 2         | 0           | S                     | 0               | 1       | 1         | 0           | S                     |

| No | Unit Kerja                | JENIS TENAGA KESEHATAN |         |           |             |                       |                 |         |           |             |                       |
|----|---------------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|
|    |                           | Dokter                 |         |           |             |                       | Dokter Gigi     |         |           |             |                       |
|    |                           | Jumlah Saat ini        |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|    |                           | ASN                    | Non ASN |           |             |                       | ASN             | Non ASN |           |             |                       |
| 10 | Puskesmas Aia Gadang      | 1                      | 0       | 2         | -1          | K                     | 0               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 11 | Puskesmas Simpang Empat   | 2                      | 0       | 3         | -1          | K                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 12 | Puskesmas Sukamenanti     | 2                      | 1       | 2         | 0           | S                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 13 | Puskesmas Kajai           | 1                      | 0       | 2         | -1          | K                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 14 | Puskesmas Talu            | 1                      | 1       | 2         | -1          | K                     | 0               | 1       | 1         | 0           | S                     |
| 15 | Puskesmas Lembah Binuang  | 2                      | 0       | 2         | 0           | S                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 16 | Puskesmas Sasak           | 2                      | 1       | 2         | 0           | S                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 17 | Puskesmas Ophir           | 3                      | 1       | 3         | 0           | S                     | 0               | 1       | 1         | 0           | S                     |
| 18 | Puskesmas IV Koto Kinali  | 1                      | 1       | 2         | -1          | K                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 19 | Puskesmas Kinali          | 2                      | 1       | 3         | -1          | K                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| 20 | Puskesmas VI Koto Selatan | 1                      | 0       | 2         | -1          | K                     | 0               | 2       | 1         | +1          | L                     |
| IV | RS Pratama Ujung Gading   | 2                      | 0       | 2         | 0           | S                     | 1               | 0       | 1         | 0           | S                     |
| V  | UPT Labkesda              | 0                      | 0       | 0         | 0           |                       | 0               | 0       | 0         | 0           |                       |
|    | Jumlah                    | 35                     | 10      | 47        | -12         |                       | 16              | 8       | 22        | +2          |                       |

Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Catatan: ASN = PNS dan PPPK; Non ASN=THL

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada jenis tenaga kesehatan Dokter Umum 74,47% adalah ASN dan 21,28% adalah Non ASN, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga dokter di fasilitas pelayanan kesehatan UPT Puskesmas masih belum terpenuhi sebesar 4,25% bahkan sudah diberdayakan tenaga Non ASN sebesar 21,28%. Sedangkan untuk jenis tenaga kesehatan Dokter Gigi menurut data 72,72% adalah ASN dan 36,36% adalah non ASN, hal ini menunjukkan bahwa tenaga Dokter gigi yang tersebar di fasilitas Pelayanan Kesehatan sudah melebihi kebutuhan yang ada sebesar 9,09%.

| No  | Unit Kerja                  | JENIS TENAGA KESEHATAN |         |           |             |                    |                 |         |           |             |                    |
|-----|-----------------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|--------------------|
|     |                             | Apoteker               |         |           |             |                    | Perawat         |         |           |             |                    |
|     |                             | Jumlah Saat ini        |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) | Jumlah Saat ini |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) |
|     |                             | ASN                    | Non ASN |           |             |                    | ASN             | Non ASN |           |             |                    |
| I   | Dinas Kesehatan             |                        |         |           | 0           |                    |                 |         | 0         |             |                    |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten |                        |         |           | 0           |                    |                 |         | 0         |             |                    |
| III | UPT Dinas Kesehatan         |                        |         |           | 0           |                    |                 |         | 0         |             |                    |
| 1   | Puskesmas Air Bangis        | 1                      | 0       | 1         | 0           | S                  | 3               | 6       | 8         | +1          | L                  |
| 2   | Puskesmas Silaping          | 0                      | 1       | 1         | 0           | S                  | 10              | 4       | 14        | 0           | S                  |
| 3   | Puskesmas Desa Baru         | 0                      | 0       | 1         | -1          | K                  | 2               | 3       | 8         | -3          | K                  |
| 4   | Puskesmas Parit             | 0                      | 2       | 1         | +1          | L                  | 10              | 6       | 11        | +5          | L                  |
| 5   | Puskesmas Ujung Gading      | 0                      | 1       | 1         | 0           | S                  | 9               | 4       | 12        | +1          | L                  |
| 6   | Puskesmas Ranah Salido      | 0                      | 1       | 1         | 0           | S                  | 7               | 3       | 9         | +1          | L                  |

| No | Unit Kerja                | JENIS TENAGA KESEHATAN |         |           |             |                       |                 |         |           |             |                       |
|----|---------------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|
|    |                           | Apoteker               |         |           |             |                       | Perawat         |         |           |             |                       |
|    |                           | Jumlah Saat ini        |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|    |                           | ASN                    | Non ASN |           |             |                       | ASN             | Non ASN |           |             |                       |
| 7  | Puskesmas Sungai Aur      | 0                      | 0       | 1         | -1          | K                     | 18              | 5       | 13        | +10         | L                     |
| 8  | Puskesmas Paraman Ampalu  | 0                      | 1       | 1         | 0           | S                     | 12              | 1       | 11        | +2          | L                     |
| 9  | Puskesmas Muaro Kiawai    | 0                      | 0       | 1         | -1          | K                     | 4               | 3       | 7         | 0           | S                     |
| 10 | Puskesmas Aia Gadang      | 0                      | 0       | 1         | -1          | K                     | 2               | 4       | 8         | -2          | K                     |
| 11 | Puskesmas Simpang Empat   | 0                      | 0       | 1         | -1          | K                     | 7               | 4       | 10        | +1          | L                     |
| 12 | Puskesmas Sukamenanti     | 0                      | 1       | 1         | 0           | S                     | 10              | 5       | 10        | +5          | L                     |
| 13 | Puskesmas Kajai           | 0                      | 1       | 1         | 0           | S                     | 1               | 5       | 8         | -2          | K                     |
| 14 | Puskesmas Talu            | 0                      | 1       | 1         | 0           | S                     | 10              | 5       | 11        | +4          | L                     |
| 15 | Puskesmas Lembah Binuang  | 0                      | 0       | 1         | -1          | K                     | 1               | 4       | 8         | -3          | K                     |
| 16 | Puskesmas Sasak           | 0                      | 1       | 1         | 0           | S                     | 2               | 5       | 9         | -2          | K                     |
| 17 | Puskesmas Ophir           | 0                      | 0       | 1         | -1          | K                     | 8               | 5       | 10        | +3          | L                     |
| 18 | Puskesmas IV Koto Kinali  | 0                      | 0       | 1         | -1          | K                     | 4               | 4       | 8         | 0           | S                     |
| 19 | Puskesmas Kinali          | 1                      | 0       | 1         | 0           | S                     | 8               | 4       | 10        | +2          | L                     |
| 20 | Puskesmas VI Koto Selatan | 0                      | 1       | 1         | 0           | K                     | 2               | 3       | 8         | -3          | K                     |
| IV | RS Pratama Ujung Gading   | 2                      | 0       | 2         | 0           | S                     | 7               | 0       | 7         | 0           | S                     |
| V  | UPT Labkesda              | 0                      | 0       | 0         | 0           |                       | 0               | 0       | 0         | 0           |                       |

| No | Unit Kerja | JENIS TENAGA KESEHATAN |         |           |             |                    |                 |         |           |             |                    |
|----|------------|------------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|--------------------|
|    |            | Apoteker               |         |           |             |                    | Perawat         |         |           |             |                    |
|    |            | Jumlah Saat ini        |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) | Jumlah Saat ini |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) |
|    |            | ASN                    | Non ASN |           |             |                    | ASN             | Non ASN |           |             |                    |
|    | Jumlah     | 4                      | 11      | 22        | -7          |                    | 137             | 83      | 200       | +20         |                    |

Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Catatan: ASN = PNS dan PPPK; Non ASN=THL

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada jenis tenaga kesehatan Apoteker hanya 18,18% adalah ASN serta 50,% non ASN, kebutuhan untuk tenaga Apoteker belum terpenuhi sebesar 31,82%. Sedangkan untuk jenis tenaga kesehatan Perawat 68,50% telah diduduki oleh ASN dan 41,5% adalah non ASN, jika dilihat dari kebutuhan untuk tenaga perawat sudah sangat berlebih keberadaannya, hanya saja untuk penyebarannya yang tidak merata, karena ada beberapa UPT Puskesmas yang masih kekurangan tenaga perawat.

| No  | Unit Kerja                  | JENIS TENAGA KESEHATAN |         |           |             |                    |                 |         |           |             |                    |
|-----|-----------------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|--------------------|
|     |                             | Bidan                  |         |           |             |                    | Perawat Gigi    |         |           |             |                    |
|     |                             | Jumlah Saat ini        |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) | Jumlah Saat ini |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) |
|     |                             | ASN                    | Non ASN |           |             |                    | ASN             | Non ASN |           |             |                    |
| I   | Dinas Kesehatan             |                        |         |           | 0           |                    |                 |         | 0         |             |                    |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten |                        |         |           | 0           |                    |                 |         | 0         |             |                    |
| III | UPT Dinas Kesehatan         |                        |         |           | 0           |                    |                 |         | 0         |             |                    |

| No | Unit Kerja               | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |                 |            |           |             |                       |
|----|--------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
|    |                          | Bidan                  |            |           |             |                       | Perawat Gigi    |            |           |             |                       |
|    |                          | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|    |                          | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN             | Non<br>ASN |           |             |                       |
| 1  | Puskesmas Air Bangis     | 9                      | 9          | 24        | -6          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 2  | Puskesmas Silaping       | 17                     | 12         | 30        | -1          | K                     | 1               | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 3  | Puskesmas Desa Baru      | 11                     | 6          | 20        | -3          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 4  | Puskesmas Parit          | 17                     | 18         | 38        | -3          | K                     | 1               | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 5  | Puskesmas Ujung Gading   | 20                     | 9          | 25        | +4          | L                     | 1               | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 6  | Puskesmas Ranah Salido   | 13                     | 8          | 21        | 0           | S                     | 2               | 0          | 1         | +1          | L                     |
| 7  | Puskesmas Sungai Aur     | 24                     | 11         | 32        | +3          | L                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 8  | Puskesmas Paraman Ampalu | 13                     | 7          | 23        | -3          | K                     | 1               | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 9  | Puskesmas Muaro Kiawai   | 9                      | 2          | 12        | -1          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 10 | Puskesmas Aia Gadang     | 10                     | 6          | 19        | -3          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 11 | Puskesmas Simpang Empat  | 12                     | 3          | 16        | -1          | K                     | 1               | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 12 | Puskesmas Sukamenanti    | 17                     | 7          | 17        | +7          | L                     | 1               | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 13 | Puskesmas Kajai          | 9                      | 5          | 19        | -5          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 14 | Puskesmas Talu           | 15                     | 7          | 22        | 0           | S                     | 1               | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 15 | Puskesmas Lembah Binuang | 10                     | 3          | 15        | -2          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |

| No | Unit Kerja                | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |                 |            |           |             |                       |
|----|---------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
|    |                           | Bidan                  |            |           |             |                       | Perawat Gigi    |            |           |             |                       |
|    |                           | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|    |                           | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN             | Non<br>ASN |           |             |                       |
| 16 | Puskesmas Sasak           | 12                     | 7          | 21        | -2          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 17 | Puskesmas Ophir           | 30                     | 6          | 33        | +3          | L                     | 1               | 1          | 1         | +1          | L                     |
| 18 | Puskesmas IV Koto Kinali  | 16                     | 9          | 25        | 0           | L                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 19 | Puskesmas Kinali          | 23                     | 9          | 27        | +5          | L                     | 1               | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 20 | Puskesmas VI Koto Selatan | 10                     | 7          | 22        | -5          | K                     | 1               | 0          | 1         | 0           | S                     |
| IV | RS Pratama Ujung Gading   | 2                      | 0          | 2         | 0           | S                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| V  | UPT Labkesda              | 0                      | 0          | 0         | 0           |                       | 0               | 0          | 0         | 0           |                       |
|    | Jumlah                    | 299                    | 151        | 463       | -13         |                       | 12              | 1          | 21        | -8          |                       |

Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Catatan: ASN = PNS dan PPPK; Non ASN=THL

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada jenis tenaga Bidan 64,58% adalah ASN 32,61 % non ASN secara garis besar jenis tenaga Bidan yang tersebar pada UPT Dinas Kesehatan masih kurang dari kebutuhan sebesar 2,81%, selain itu penyebaran tenaga Kesehatan bidan belum merata, karena terdapat puskesmas yang kekurangan dan kelebihan tenaga bidan. Sedangkan untuk jenis tenaga kesehatan perawat gigi 57,14% ASN serta 4,7% adalah non ASN dan secara keseluruhan tenaga kesehatan pada jenis perawat gigi yang tersebar di UPT Dinas Kesehatan masih kurang sebesar 38,09% dari kebutuhan.

| No  | Unit Kerja                  | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |                 |            |           |             |                       |
|-----|-----------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
|     |                             | Kesehatan Masyarakat   |            |           |             |                       | Gizi            |            |           |             |                       |
|     |                             | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|     |                             | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN             | Non<br>ASN |           |             |                       |
| I   | Dinas Kesehatan             |                        |            |           | 0           |                       |                 |            |           | 0           |                       |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten |                        |            |           | 0           |                       |                 |            |           | 0           |                       |
| III | UPT Dinas Kesehatan         |                        |            |           | 0           |                       |                 |            |           | 0           |                       |
| 1   | Puskesmas Air Bangis        | 1                      | 1          | 1         | +1          | L                     | 0               | 2          | 2         | -2          | K                     |
| 2   | Puskesmas Silaping          | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 0               | 2          | 2         | -2          | K                     |
| 3   | Puskesmas Desa Baru         | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 0               | 1          | 2         | -2          | K                     |
| 4   | Puskesmas Parit             | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 1               | 2          | 2         | -1          | K                     |
| 5   | Puskesmas Ujung Gading      | 0                      | 2          | 1         | +1          | K                     | 3               | 0          | 2         | 1           | L                     |
| 6   | Puskesmas Ranah Salido      | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 0               | 1          | 1         | -1          | K                     |
| 7   | Puskesmas Sungai Aur        | 0                      | 2          | 1         | +1          | K                     | 1               | 1          | 1         | 0           | S                     |
| 8   | Puskesmas Paraman Ampalu    | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 1               | 0          | 2         | -1          | K                     |
| 9   | Puskesmas Muaro Kiawai      | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 1               | 1          | 2         | -1          | K                     |
| 10  | Puskesmas Aia Gadang        | 0                      | 2          | 1         | -1          | K                     | 0               | 1          | 2         | -2          | K                     |
| 11  | Puskesmas Simpang Empat     | 0                      | 2          | 2         | 0           | S                     | 1               | 1          | 2         | -1          | K                     |
| 12  | Puskesmas Sukamenanti       | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 1               | 0          | 2         | -1          | K                     |

| No | Unit Kerja                | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |                 |            |           |             |                       |
|----|---------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
|    |                           | Kesehatan Masyarakat   |            |           |             |                       | Gizi            |            |           |             |                       |
|    |                           | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|    |                           | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN             | Non<br>ASN |           |             |                       |
| 13 | Puskesmas Kajai           | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 1               | 0          | 2         | -1          | K                     |
| 14 | Puskesmas Talu            | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 1               | 0          | 2         | -1          | K                     |
| 15 | Puskesmas Lembah Binuang  | 1                      | 1          | 2         | 0           | S                     | 1               | 1          | 2         | -1          | K                     |
| 16 | Puskesmas Sasak           | 0                      | 2          | 1         | -1          | K                     | 0               | 2          | 2         | -2          | K                     |
| 17 | Puskesmas Ophir           | 1                      | 2          | 1         | +2          | L                     | 0               | 2          | 2         | -2          | K                     |
| 18 | Puskesmas IV Koto Kinali  | 1                      | 1          | 1         | +1          | L                     | 0               | 2          | 2         | -2          | K                     |
| 19 | Puskesmas Kinali          | 1                      | 1          | 2         | 0           | S                     | 1               | 1          | 2         | -1          | K                     |
| 20 | Puskesmas VI Koto Selatan | 0                      | 2          | 1         | +1          | K                     | 0               | 2          | 2         | -2          | K                     |
| IV | RS Pratama Ujung Gading   | 1                      | 0          | 1         | 0           | S                     | 2               | 0          | 2         | 0           | S                     |
| V  | UPT Labkesda              | 0                      | 0          | 0         | 0           |                       | 0               | 0          | 0         | 0           |                       |
|    | Jumlah                    | 6                      | 27         | 24        | +5          |                       | 15              | 22         | 40        | -25         |                       |

Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Catatan: ASN = PNS dan PPPK; Non ASN=THL

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada jenis tenaga Kesehatan Masyarakat 25% adalah ASN dan lebih dari seratus persen (112%) non ASN. Sedangkan

untuk jenis tenaga kesehatan gizi 60% ASN serta 55% adalah non ASN dan secara keseluruhan tenaga kesehatan pada jenis tenaga gizi yang tersebar di UPT Dinas Kesehatan masih kurang sebesar 7,5% dari kebutuhan.

| No  | Unit Kerja                  | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |                  |            |           |             |                       |
|-----|-----------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
|     |                             | Kesling                |            |           |             |                       | Asisten Apoteker |            |           |             |                       |
|     |                             | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini  |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|     |                             | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN              | Non<br>ASN |           |             |                       |
| I   | Dinas Kesehatan             |                        |            |           | 0           |                       |                  |            | 0         |             |                       |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten |                        |            |           | 0           |                       |                  |            | 0         |             |                       |
| III | UPT Dinas Kesehatan         |                        |            |           | 0           |                       |                  |            | 0         |             |                       |
| 1   | Puskesmas Air Bangis        | 1                      | 2          | 2         | 0           | S                     | 1                | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 2   | Puskesmas Silaping          | 0                      | 2          | 2         | 0           | S                     | 0                | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 3   | Puskesmas Desa Baru         | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0                | 1          | 1         | 0           | K                     |
| 4   | Puskesmas Parit             | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 1                | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 5   | Puskesmas Ujung Gading      | 0                      | 2          | 2         | 0           | S                     | 1                | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 6   | Puskesmas Ranah Salido      | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0                | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 7   | Puskesmas Sungai Aur        | 1                      | 1          | 1         | +1          | L                     | 1                | 0          | 3         | -2          | K                     |
| 8   | Puskesmas Paraman Ampalu    | 1                      | 1          | 2         | 0           | S                     | 0                | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 9   | Puskesmas Muaro Kiawai      | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0                | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 10  | Puskesmas Aia Gadang        | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 0                | 1          | 1         | 0           | S                     |

| No | Unit Kerja                | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |                  |            |           |             |                       |
|----|---------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
|    |                           | Kesling                |            |           |             |                       | Asisten Apoteker |            |           |             |                       |
|    |                           | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini  |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|    |                           | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN              | Non<br>ASN |           |             |                       |
| 11 | Puskesmas Simpang Empat   | 1                      | 1          | 2         | 0           | S                     | 1                | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 12 | Puskesmas Sukamenanti     | 1                      | 1          | 2         | 0           | S                     | 0                | 0          | 1         | -1          | S                     |
| 13 | Puskesmas Kajai           | 0                      | 0          | 2         | -2          | K                     | 0                | 0          | 1         | -1          | S                     |
| 14 | Puskesmas Talu            | 1                      | 0          | 2         | -1          | K                     | 0                | 0          | 2         | -2          | K                     |
| 15 | Puskesmas Lembah Binuang  | 1                      | 1          | 2         | 0           | S                     | 1                | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 16 | Puskesmas Sasak           | 0                      | 0          | 2         | -2          | K                     | 0                | 1          | 1         | 0           | S                     |
| 17 | Puskesmas Ophir           | 1                      | 1          | 2         | 0           | S                     | 1                | 1          | 1         | +1          | S                     |
| 18 | Puskesmas IV Koto Kinali  | 2                      | 1          | 2         | 0           | S                     | 1                | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 19 | Puskesmas Kinali          | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0                | 0          | 1         | -1          | S                     |
| 20 | Puskesmas VI Koto Selatan | 1                      | 0          | 1         | 0           | S                     | 0                | 0          | 1         | -1          | S                     |
| IV | RS Pratama Ujung Gading   | 0                      | 0          | 0         | 0           |                       | 2                | 0          | 2         | 0           | S                     |
| V  | UPT Labkesda              | 0                      | 0          | 0         | 0           |                       | 0                | 0          | 0         | 0           |                       |
|    | Jumlah                    | 11                     | 19         | 37        | -9          |                       | 10               | 4          | 25        | -11         |                       |

Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Catatan: ASN = PNS dan PPPK; Non ASN=THL

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada jenis tenaga Kesehatan Lingkungan 29,72% adalah ASN dan 51,35% non ASN, hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesling di UPT Puskesmas masih belum terpenuhi sebesar 24,32% yang bahkan sudah duberdayakan tenaga Non ASN. Sedangkan untuk jenis tenaga kesehatan asisten apoteker penyebarannya sebesar 40% ASN dan 16% adalah non ASN menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan tenaga asisten apoteker di UPT Puskesmas, selain itu juga terdapat kesenjangan penyebaran di salah satu UPT Puskesmas terdapat tenaga yang melebihi kebutuhan, sedangkan puskesmas lain masih belum terpenuhi tenaga asisten apoteker tersebut.

| No  | Unit Kerja                  | JENIS TENAGA KESEHATAN |         |           |             |                    |  |         |           |             |                    |
|-----|-----------------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|--|---------|-----------|-------------|--------------------|
|     |                             | Radiografer            |         |           |             |                    | Ahli Laboratorium Medik (Analis, Pranata Labkes) |         |           |             |                    |
|     |                             | Jumlah Saat ini        |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) | Jumlah Saat ini                                  |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) |
|     |                             | ASN                    | Non ASN |           |             |                    | ASN  | Non ASN |           |             |                    |
| I   | Dinas Kesehatan             | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                  | -  | -       | -         | 0           | -                  |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                  | -  | -       | -         | 0           | -                  |
| III | UPT Dinas Kesehatan         | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                  | -  | -       | -         | 0           | -                  |
| 1   | Puskesmas Air Bangis        | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                  | 0  | 1       | 2         | -1          | K                  |
| 2   | Puskesmas Silaping          | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                  | 1  | 0       | 2         | -1          | K                  |
| 3   | Puskesmas Desa Baru         | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                  | 1  | 0       | 1         | 0           | S                  |
| 4   | Puskesmas Parit             | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                  | 2  | 0       | 2         | 0           | S                  |
| 5   | Puskesmas Ujung Gading      | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                  | 1  | 1       | 2         | 0           | S                  |
| 6   | Puskesmas Ranah Salido      | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                  | 1  | 0       | 2         | -1          | K                  |

| No | Unit Kerja                | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |  |            |           |             |                       |
|----|---------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--|------------|-----------|-------------|-----------------------|
|    |                           | Radiografer            |            |           |             |                       | Ahli Laboratorium Medik (Analis, Pranata Labkes) |            |           |             |                       |
|    |                           | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini                                  |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|    |                           | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN  | Non<br>ASN |           |             |                       |
| 7  | Puskesmas Sungai Aur      | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 2  | 0          | 2         | 0           | S                     |
| 8  | Puskesmas Paraman Ampalu  | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0  | 2          | 2         | 0           | S                     |
| 9  | Puskesmas Muaro Kiawai    | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0  | 1          | 2         | -1          | K                     |
| 10 | Puskesmas Aia Gadang      | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0  | 1          | 1         | 0           | S                     |
| 11 | Puskesmas Simpang Empat   | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0  | 1          | 2         | -1          | K                     |
| 12 | Puskesmas Sukamenanti     | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 1  | 1          | 2         | 0           | S                     |
| 13 | Puskesmas Kajai           | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0  | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 14 | Puskesmas Talu            | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0  | 2          | 2         | 0           | S                     |
| 15 | Puskesmas Lembah Binuang  | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0  | 1          | 1         | 0           | S                     |
| 16 | Puskesmas Sasak           | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0  | 1          | 2         | -1          | K                     |
| 17 | Puskesmas Ophir           | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0  | 0          | 2         | 0           | S                     |
| 18 | Puskesmas IV Koto Kinali  | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 1  | 0          | 2         | -1          | K                     |
| 19 | Puskesmas Kinali          | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 1  | 0          | 2         | -1          | K                     |
| 20 | Puskesmas VI Koto Selatan | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0  | 1          | 1         | 0           | S                     |
| IV | RS Pratama Ujung Gading   | 1                      | 0          | 1         | 0           | S                     | 1  | 0          | 2         | -1          | S                     |

| No | Unit Kerja   | JENIS TENAGA KESEHATAN |         |           |             |                    |  |         |           |             |                    |
|----|--------------|------------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|--|---------|-----------|-------------|--------------------|
|    |              | Radiografer            |         |           |             |                    | Ahli Laboratorium Medik (Analis, Pranata Labkes) |         |           |             |                    |
|    |              | Jumlah Saat ini        |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) | Jumlah Saat ini                                  |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) |
|    |              | ASN                    | Non ASN |           |             |                    | ASN  | Non ASN |           |             |                    |
| V  | UPT Labkesda | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                  | 1  | 1       | 2         | 0           | S                  |
|    | Jumlah       | 1                      | 0       | 1         | 0           |                    | 13   | 14      | 39        | -10         |                    |

Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Catatan: ASN = PNS dan PPPK; Non ASN=THL

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada jenis tenaga Kesehatan Radiografer berjumlah 1 Orang ASN pada RS Pratama Ujung Gading. Sedangkan untuk jenis tenaga kesehatan Analis/Pranata Laboratorium 33,33% ASN serta 35,89% adalah non ASN dan secara keseluruhan tenaga kesehatan pada jenis tenaga kesehatan Analis/Pranata Laboratorium kurang sebesar 30,76% dari kebutuhan yang tersebar di UPT Dinas Kesehatan.

| No  | Unit Kerja                  | JENIS TENAGA KESEHATAN |         |           |             |                    |                 |         |           |             |                    |
|-----|-----------------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|--------------------|
|     |                             | Perekam Medis          |         |           |             |                    | Refaksi Optisi  |         |           |             |                    |
|     |                             | Jumlah Saat ini        |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) | Jumlah Saat ini |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan (S/K/L) |
|     |                             | ASN                    | Non ASN |           |             |                    | ASN             | Non ASN |           |             |                    |
| I   | Dinas Kesehatan             |                        |         |           | 0           |                    |                 |         |           | 0           |                    |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten |                        |         |           | 0           |                    |                 |         |           | 0           |                    |
| III | UPT Dinas Kesehatan         |                        |         |           | 0           |                    |                 |         |           | 0           |                    |

| No | Unit Kerja               | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |                 |            |           |             |                       |
|----|--------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
|    |                          | Perekam Medis          |            |           |             |                       | Refaksi Optisi  |            |           |             |                       |
|    |                          | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|    |                          | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN             | Non<br>ASN |           |             |                       |
| 1  | Puskesmas Air Bangis     | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 2  | Puskesmas Silaping       | 0                      | 0          | 2         | -2          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 3  | Puskesmas Desa Baru      | 0                      | 0          | 2         | -2          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 4  | Puskesmas Parit          | 0                      | 0          | 2         | -2          | K                     | 0               | 1          | 1         | 0           | K                     |
| 5  | Puskesmas Ujung Gading   | 0                      | 0          | 1         | -1          | K                     | 1               | 0          | 1         | 0           | S                     |
| 6  | Puskesmas Ranah Salido   | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 7  | Puskesmas Sungai Aur     | 0                      | 0          | 2         | -2          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 8  | Puskesmas Paraman Ampalu | 0                      | 1          | 1         | 0           | S                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 9  | Puskesmas Muaro Kiawai   | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 10 | Puskesmas Aia Gadang     | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 11 | Puskesmas Simpang Empat  | 2                      | 0          | 2         | 0           | S                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 12 | Puskesmas Sukamenanti    | 0                      | 1          | 1         | 0           | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 13 | Puskesmas Kajai          | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 14 | Puskesmas Talu           | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |
| 15 | Puskesmas Lembah Binuang | 0                      | 1          | 2         | -1          | K                     | 0               | 0          | 1         | -1          | K                     |

| No | Unit Kerja                | JENIS TENAGA KESEHATAN |         |           |             |                       |                 |         |           |             |                       |
|----|---------------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|
|    |                           | Perekam Medis          |         |           |             |                       | Refaksi Optisi  |         |           |             |                       |
|    |                           | Jumlah Saat ini        |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini |         | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|    |                           | ASN                    | Non ASN |           |             |                       | ASN             | Non ASN |           |             |                       |
| 16 | Puskesmas Sasak           | 0                      | 1       | 2         | -1          | K                     | 0               | 0       | 1         | -1          | K                     |
| 17 | Puskesmas Ophir           | 0                      | 0       | 2         | -2          | K                     | 0               | 0       | 1         | -1          | K                     |
| 18 | Puskesmas IV Koto Kinali  | 0                      | 0       | 2         | -2          | K                     | 0               | 0       | 1         | -1          | K                     |
| 19 | Puskesmas Kinali          | 1                      | 0       | 2         | -1          | K                     | 0               | 0       | 1         | -1          | K                     |
| 20 | Puskesmas VI Koto Selatan | 1                      | 0       | 1         | 0           | S                     | 0               | 0       | 1         | -1          | K                     |
| IV | RS Pratama Ujung Gading   | 2                      | 0       | 2         | 0           | S                     | 0               | 0       | 0         | 0           | -                     |
| V  | UPT Labkesda              | 0                      | 0       | 0         | 0           | -                     | 0               | 0       | 0         | 0           | -                     |
|    | Jumlah                    | 6                      | 10      | 38        | -22         |                       | 1               | 1       | 20        | -19         |                       |

Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Catatan: ASN = PNS dan PPPK; Non ASN=THL

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada jenis tenaga Kesehatan Medical Record 15,78% adalah ASN serta 26,31% adalah non ASN, hal ini menunjukkan bahwa UPT Puskesmas masih kekurangan tenaga medical record sebesar 57,89% dari kebutuhan. Sedangkan untuk jenis tenaga kesehatan Refraktion 1 (satu) orang ASN pada Puskesmas Ujung Gading dan 1 (satu) orang non ASN pada Puskesmas Parit dan secara keseluruhan tenaga Refraktion kurang sebanyak 90% dari kebutuhan yang tersebar di UPT Dinas Kesehatan.

| No  | Unit Kerja                  | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |                   |            |           |             |                       |
|-----|-----------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
|     |                             | Keterampilan Fisik     |            |           |             |                       | Keteknisian Medis |            |           |             |                       |
|     |                             | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini   |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|     |                             | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN               | Non<br>ASN |           |             |                       |
| I   | Dinas Kesehatan             | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| II  | Instalasi Farmasi Kabupaten | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| III | UPT Dinas Kesehatan         | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 1   | Puskesmas Air Bangis        | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 2   | Puskesmas Silaping          | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 3   | Puskesmas Desa Baru         | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 4   | Puskesmas Parit             | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 5   | Puskesmas Ujung Gading      | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 6   | Puskesmas Ranah Salido      | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 7   | Puskesmas Sungai Aur        | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 8   | Puskesmas Paraman Ampalu    | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 9   | Puskesmas Muaro Kiawai      | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 10  | Puskesmas Aia Gadang        | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 11  | Puskesmas Simpang Empat     | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 12  | Puskesmas Sukamenanti       | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |

| No | Unit Kerja                | JENIS TENAGA KESEHATAN |            |           |             |                       |                   |            |           |             |                       |
|----|---------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
|    |                           | Keterampilan Fisik     |            |           |             |                       | Keteknisian Medis |            |           |             |                       |
|    |                           | Jumlah Saat ini        |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) | Jumlah Saat ini   |            | Kebutuhan | Kesenjangan | Keterangan<br>(S/K/L) |
|    |                           | ASN                    | Non<br>ASN |           |             |                       | ASN               | Non<br>ASN |           |             |                       |
| 13 | Puskesmas Kajai           | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 14 | Puskesmas Talu            | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 15 | Puskesmas Lembah Binuang  | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 16 | Puskesmas Sasak           | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 17 | Puskesmas Ophir           | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 18 | Puskesmas IV Koto Kinali  | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 19 | Puskesmas Kinali          | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| 20 | Puskesmas VI Koto Selatan | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| IV | RS Pratama Ujung Gading   | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
| V  | UPT Labkesda              | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |
|    | Jumlah                    | 0                      | 0          | 0         | 0           | -                     | 0                 | 0          | 0         | 0           | -                     |

Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinkes Kab. Pasaman Barat Tahun 2020

Catatan: ASN = PNS dan PPPK; Non ASN=THL

## 2.2.2. Sarana dan Prasarana

### 2.2.2.1 Data sarana

#### a) Aset Dinas Kesehatan

Hingga tahun 2020, jumlah aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tercatat sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Daftar Aset Tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020**

| Kode Bidang | Pembidangan                          | Nilai(Rp)                 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 01          | Golongan Tanah                       | 7.338.127.522,00          |
| 0101        | Tanah                                | 7.338.127.522,00          |
| 02          | Golongan Peralatan dan Mesin         | 77.715.160.119,04         |
|             | Alat-Alat Besar                      | 430.121.437,99            |
|             | Alat - Alat Angkutan                 | 12.421.699.118,80         |
|             | Alat Bengkel dan Alat Ukur           | 74.572.744,20             |
|             | Alat Pertanian                       | 58.700.000,00             |
|             | Alat Kantor dan Rumah Tangga         | 8.260.604.750,54          |
|             | Alat Studio dan Alat Komunikasi      | 936.431.920,32            |
|             | Alat-Alat Kedokteran dan Kesehatan   | 46.378.376.057,80         |
|             | Alat Laboratorium                    | 6.102.209.016,80          |
|             | Alat-Alat Persenjataan/Keamanan      | 29.925.000,00             |
|             | Alat Keselamatan Kerja               | 14.733.059,00             |
|             | Peralatan Olahraga                   | 80.467.341,00             |
| 03          | Golongan Gedung dan Bangunan         | 125.648.840.962,34        |
|             | Bangunan Gedung                      | 125.541.083.962,34        |
|             | Tugu titik kontrol/pasti             | 107.757.000,00            |
| 06          | Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan | 99.889.520,00             |
|             | <b>Jumlah</b>                        | <b>210.802.018.123,38</b> |

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset Tahun 2020

Dari tabel di atas, total jumlah aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 sejumlah Rp 210.802.018.123,38.

## b) Sarana Kesehatan Pemerintah

## 1). Puskesmas

Tabel 2.8 Sarana Kesehatan Di Puskesmas Tahun 2020

| No | Puskesmas                | Sarana Kesehatan  |       |              |                   |         |                       |         |                     |                  |           |         |        |             |
|----|--------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------|------------------|-----------|---------|--------|-------------|
|    |                          | Kondisi Puskesmas | Pustu | Kondisi      | Rumah Dinas Medis | Kondisi | Rumah Dinas Paramedis | Kondisi | Polindes/ Poskesdes | Kondisi          | Ambulance | Kondisi | Roda 2 | Kondisi     |
| 1  | Puskesmas Air Bangis     | B                 | 2     | B, RB        | 2                 | B       | 6                     | 5B, 1RR | 5                   | 2B, 2RS, 1RB     | 2         | B       | 6      | 3B dan 3RR  |
| 2  | Puskesmas Silaping       | B                 | 0     | -            | 1                 | B       | 1                     | B       | 15                  | 11B,2R, 2RS      | 2         | B       | 13     | 10B dan 3RR |
| 3  | Puskesmas Desa Baru      | B                 | 1     | RS           | 1                 | B       | 1                     | B       | 7                   | 6B, 1RR          | 1         | B       | 5      | 1B dan 4RR  |
| 4  | Puskesmas Parit          | B                 | 8     | 4B, 3RS, 1RB | 1                 | B       | 2                     | B, RR   | 26                  | 17B,2R, 3RS,4B   | 2         | B       | 15     | 6B dan 9RR  |
| 5  | Puskesmas Ujung Gading   | B                 | 2     | RR           | 4                 | 3B, 1RB | 2                     | B       | 6                   | 3B, 1RR, 2RS     | 2         | B       | 6      | B           |
| 6  | Puskesmas Ranah Salido   | B                 | 1     | RB           | 2                 | B       | 0                     | -       | 7                   | 2B, 5RB          | 1         | B       | 3      | 2B dan RR   |
| 7  | Puskesmas Sungai Aur     | B                 | 6     | 5RS, 1RB     | 1                 | B       | 0                     | -       | 14                  | 3B, 6RR, 4RS,1RB | 1         | RR      | 8      | 2B dan 6RR  |
| 8  | Puskesmas Paraman Ampalu | B                 | 2     | RB           | 2                 | B, RB   | 1                     | B       | 13                  | 8B, 3RR, 2RS     | 2         | B       | 4      | B           |
| 9  | Puskesmas Muaro Kiawai   | B                 | 3     | RS           | 2                 | B       | 0                     | -       | 3                   | 3B               | 1         | B       | 4      | 3B dan 1RR  |
| 10 | Puskesmas Aia Gadang     | B                 | 1     | RR           | 1                 | B       | 1                     | B       | 6                   | 6B               | 1         | B       | 2      | RR          |

| No           | Puskesmas                 | Sarana Kesehatan  |           |              |                   |         |                       |         |                     |              |           |         |            |            |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------|--------------|-----------|---------|------------|------------|
|              |                           | Kondisi Puskesmas | Pustu     | Kondisi      | Rumah Dinas Medis | Kondisi | Rumah Dinas Paramedis | Kondisi | Polindes/ Poskesdes | Kondisi      | Ambulance | Kondisi | Roda 2     | Kondisi    |
| 11           | Puskesmas Simpang Empat   | B                 | 1         | B            | 1                 | B       | 1                     | B       | 7                   | 7B           | 1         | B       | 2          | B          |
| 12           | Puskesmas Sukamenanti     | B                 | 1         | B            | 2                 | B, RR   | 2                     | RR      | 5                   | 1B, 4RS      | 1         | B       | 4          | 2B dan 2RR |
| 13           | Puskesmas Kajai           | B                 | 1         | RB           | 1                 | B       | 1                     | B       | 7                   | 1B, 5RS, 1RB | 1         | B       | 6          | 5B dan 1RR |
| 14           | Puskesmas Talu            | B                 | 1         | RS           | 1                 | RR      | 2                     | RR      | 10                  | 6B, 2RS, 2RB | 2         | B       | 3          | RR         |
| 15           | Puskesmas Lembah Binuang  | B                 | 0         | -            | 1                 | RR      | 4                     | RR      | 3                   | 2B, 1RS      | 1         | B       | 3          | B          |
| 16           | Puskesmas Sasak           | B                 | 2         | B, RB        | 1                 | B       | 2                     | B       | 9                   | 4B, 5RR      | 2         | B       | 3          | B          |
| 17           | Puskesmas Ophir           | B                 | 4         | 2B, 1RR, 1RB | 1                 | B       | 1                     | B       | 20                  | 20B          | 1         | B       | 4          | 3B dan 1RR |
| 18           | Puskesmas IV Koto Kinali  | B                 | 2         | B, RB        | 1                 | RR      | 0                     | -       | 12                  | 12B          | 2         | B       | 3          | RR         |
| 19           | Puskesmas Kinali          | B                 | 1         | B            | 2                 | B       | 2                     | B       | 17                  | 14B, 3RS     | 1         | B       | 5          | 2B dan 3RR |
| 20           | Puskesmas VI Koto Selatan | B                 | 2         | B, RB        | 2                 | B       | 0                     | -       | 10                  | 10B          | 1         | B       | 7          | B          |
| <b>Total</b> |                           |                   | <b>41</b> |              | <b>30</b>         |         | <b>29</b>             |         | <b>202</b>          |              | <b>28</b> |         | <b>106</b> |            |

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, secara umum sarana dan prasarana kesehatan sudah tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Masing-masing kecamatan sudah memiliki minimal 1 Puskesmas, didukung dengan adanya puskesmas pembantu (pustu), rumah dinas medis dan paramedis, pos persalinan desa (polindes), pos kesehatan desa (poskesdes), ambulans serta kendaraan dinas roda dua.

## 2). Sarana Kesehatan Pemerintah lainnya

**Tabel 2.9 Sarana Kesehatan Pemerintah lainnya Tahun 2020**

| No | Sarana                           | Jumlah |
|----|----------------------------------|--------|
| 1  | Rumah Sakit<br>- RSUD            | 1      |
| 2  | Gudang Farmasi (IFK)             | 1      |
| 3  | Kendaraan operasional roda empat | 10     |
| 4  | Kendaraan operasional roda dua   | 17     |
| 5  | Apotek                           | 1      |

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Pasaman Barat memiliki sarana kesehatan pemerintah berupa RSUD, gudang farmasi (IFK), apotek, serta kendaraan dinas roda dua dan roda empat.

## c) Sarana Kesehatan Swasta

**Tabel 2.10 Sarana Kesehatan Swasta Tahun 2020**

| No | Sarana                                    | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1  | Rumah Sakit<br>- RSI Ibnu Sina<br>(YARSI) | 1      |
| 2  | Rumah Bersalin                            | 2      |
| 3  | Klinik                                    | 9      |
| 4  | Praktek Dokter<br>Perorangan              | 164    |
| 5  | Apotek                                    | 29     |
| 6  | Toko Obat                                 | 24     |

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, sarana kesehatan swasta yang ada di Kabupaten Pasaman Barat meliputi Rumah Sakit Ibnu Sina, rumah bersalin, klinik, praktik

dokter, apotek dan juga toko obat yang tersebar wilayah kerja di Kabupaten Pasaman Barat.

**Tabel 2.11 Sarana Kesehatan Pemerintah Berdasarkan Tempat Tidur,  
BOR, ALOS Tahun 2020**

| NO             | NAMA RUMAH SAKIT <sup>a</sup> | JUMLAH TEMPAT TIDUR | PASIE KELUAR (HIDUP + MATI) | JUMLAH HARI PERAWATAN | JUMLAH LAMA DIRAWAT | BOR (%) | BTO (KALI) | TOI (HARI) | ALOS (HARI) |
|----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------|------------|-------------|
| 1              | 2                             | 3                   | 4                           | 5                     | 6                   | 7       | 8          | 9          | 10          |
| 1              | Rumah Sakit Umum Daerah       | 145                 | 30.478                      | 14.986                | 18.346              | 28,3    | 210,2      | 1,2        | 0,6         |
| 2              | RSI IBNUSINA YARSI            | 111                 | 8.337                       | 22.903                | 27.112              | 56,5    | 75,1       | 2,1        | 3,3         |
| 3              | RSIA AL-IHSAN                 | 35                  | 1.683                       | 0                     | 0                   | 0,0     | 48,1       | 0,0        | 0,0         |
| KABUPATEN/KOTA |                               | 291                 | 40.498                      | 37.889                | 45.458              | 35,7    | 139,2      | 1,7        | 1,1         |

*Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020*

*SPM Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020*

Arti indikator BOR, BTO, TOI dan ALOS ini adalah indikator yang dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pengelolaan rumah sakit. Semakin tinggi nilai BOR berarti semakin tinggi penggunaan tempat tidur di pelayanan kesehatan yang digunakan untuk perawatan pasien. Semakin banyak pasien yang menggunakan tempat tidur berarti semakin besar pula beban kerja petugas di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, sebaliknya jika nilai indikator BOR yang rendah berarti semakin sedikit tempat tidur yang digunakan untuk merawat pasien dibandingkan dengan tempat tidur yang tersedia. Jumlah pasien yang sedikit menimbulkan masalah pendapatan ekonomi bagi pihak fasilitas pelayanan kesehatan. Pasien sedikit ini juga akan menimbulkan pertanyaan bagaimana pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut. Jika dilihat dari nilai BOR RSUD yaitu 28,3 %, nilai ini masih jauh dari Standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 60-85%, untuk BOR RSI Ibnu Sina sebesar 56,5%, nilai ini hampir mendekati standar yang sudah ditetapkan, sedangkan data RSIA AL-IHSAN belum tersedia ditahun 2020.

Indikator BTO (*Bed Turn Over*) merupakan Angka yang menunjukkan tingkat penggunaan sebuah tempat tidur, rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam tahun yang bersangkutan, nilai BTO Ideal menurut

kementerian Kesehatan yaitu 40-50 kali. Jika dilihat dari nilai BTO dari seluruh Rumah Sakit yang ada, hanya nilai BTO RSIA AL-IHSAN yang sudah mencapai nilai ideal menurut kementerian kesehatan. Sedangkan Indikator TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya, Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari menurut Kementerian Kesehatan RI dan jika dilihat pada tabel diatas, nilai TOI untuk RSUD dan RSI Ibnu Sina sdh mencapai standar dari meneterian kesehatan RI.

Begitu juga dengan nilai LOS, indikator ini bisa dinilai berdasarkan nilai BOR suatu Rumah sakit, Jika dilihat dari nilai LOS RSUD yaitu 0,6 hari dan LOS RSI Ibnu Sina sebesar 3,6 hari, nilai ini masih jauh dari Standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 6-9 hari.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**

#### **2.3.1 Kinerja Pelayanan Kesehatan**

Kinerja pelayanan kesehatan dapat diukur dari pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pada aturan SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan, sedangkan pada SPM saat ini pencapaian target-target tersebut menjadi penilaian kinerja pemerintah daerah.

SPM harus dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. SPM bidang kesehatan akan meliputi jenis pelayanan dasar, dengan target pelayanan minimal mengacu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs berisi tujuan pembangunan berkelanjutan, memiliki batas waktu tertentu dan target terukur yang harus dicapai hingga akhir 2030.

**Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan sesuai SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2016- 2021**

| No | Indikator Kinerja   | Target NSPK | Target IKK | Target Renstra Dinkes Tahun |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun |      |        |        |        | Rasio Capaian Pada Tahun |      |        |        |        |
|----|---|-------------|------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|--------|--------|--------|--------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |   |             |            | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                    | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                     | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1  | Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar                     |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 62.13% | 62.32% | 58.62% |                          |      | 62.13% | 62.32% | 58.62% |
| 2  | Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar                  |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 73.47% | 73.31% | 72.88% |                          |      | 73.47% | 73.31% | 72.88% |
| 3  | Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar               |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 74.12% | 78.26% | 73.82% |                          |      | 74.12% | 78.26% | 73.82% |
| 4  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                             |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 53.86% | 68.01% | 58.93% |                          |      | 53.86% | 68.01% | 58.93% |
| 5  | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar         |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 95.99% | 85.66% | 27.81% |                          |      | 95.99% | 85.66% | 27.81% |
| 6  | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar                |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 10.30% | 24.86% | 12.14% |                          |      | 10.30% | 24.86% | 12.14% |
| 7  | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar                   |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 77.27% | 23.41% | 49.59% |                          |      | 77.27% | 23.41% | 49.59% |
| 8  | Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar               |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 100%   | 6.19%  | 3.32%  |                          |      | 100%   | 6.19%  | 3.32%  |
| 9  | Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar        |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 100%   | 2.71%  | 18.51% |                          |      | 100%   | 2.71%  | 18.51% |
| 10 | Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar   |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 65.09% | 24.57% | 48.89% |                          |      | 65.09% | 24.57% | 48.89% |
| 11 | Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar         |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 82.17% | 53.86% | 13.78% |                          |      | 82.17% | 53.86% | 13.78% |
| 12 | Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar |             |            |                             |      | 100% | 100% | 100% |                         |      | 100%   | 67.17% | 46.06% |                          |      | 100%   | 67.17% | 46.06% |

*Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020  
SPM Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020*

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan didapatkan dari hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021. Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021.

Sasaran strategis Dinas Kesehatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan pada lingkup OPD Dinas Kesehatan dengan indikator Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Dinas Kesehatan
2. Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel pada lingkup OPD Dinkes dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
3. Meningkatkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas pada Dinkes dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Puskesmas)
4. Meningkatnya derajat kesehatan ibu, bayi dan balita dengan indikator AKI,AKB, AKABA dan prevalensi stunting dengan indikator :
  - a. Menurunnya angka kematian pada kelompok rentan, yang terdiri dari ibu dan bayi.
  - b. Meningkatnya derajat kesehatan ibu, bayi dan balita dengan indikator AKI,AKB, AKABA
  - c. Prevalensi Stunting
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar dengan indikator capaian persentase SPM kesehatan.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan indikator Persentase Rumah Tangga ber-PHBS.

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Belum tercapainya target SPM dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada pelayanan kesehatan ibu hamil

Dilihat dari data riil untuk ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar sudah tercapai dibandingkan dengan data pusdatin, karena sasaran pusdatin yang terlalu tinggi. Data sasaran yang digunakan bersumber dari data Pusdatin.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Dilihat dari sasaran data riil jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tercapai 72,88%, untuk 27,12% kendala dilapangan karna pandemi covid-19. Ibu hamil ada ketakutan bersalin di tempat pelayanan kesehatan dan memilih bersalin di rumah dan di polindes. Solusi dalam permasalahan pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah dengan tetap memberikan motivasi pada masyarakat agar bersalin di fasilitas kesehatan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 secara ketat, sehingga penularan Covid-19 di faskes tidak ada lagi.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup yang riil tahun 2020 yaitu sebanyak 8088 kelahiran hidup, untuk kunjungan neonatus lengkap sudah mencapai sebanyak 73,82%, namun untuk kunjungan pertama neonatus (KN 1) sudah mencapai 99% jika dibandingkan dengan data riil dari seluruh kelahiran hidup yang ada. Selain itu masih kurangnya validasi dari laporan yang dikirim terkait standar pelayanan minimal tahun 2020 oleh puskesmas ke-kabupaten, kurangnya evaluasi berkala dari puskesmas setelah adanya evaluasi dari kabupaten, dan juga karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat bidan desa mengalami kesulitan untuk melakukan kunjungan rumah bayi baru lahir. Solusinya adalah dengan mendorong peningkatan kompetensi tenaga dalam pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita, melakukan monitoring dan evaluasi, supervisi ke lapangan, serta dengan pertemuan dan sosialisasi pengolahan data dan pelaporan.

#### 4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan anak balita adalah jika dibandingkan dengan sasaran anak balita riil tahun 2020 (34.902 sasaran) maka kunjungan anak balita didapatkan sebanyak 58,93%. Karena pandemi covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap capaian kunjungan anak balita karena posyandu tidak jalan dan kunjungan rumah juga tidak jalan selama 4 bulan. Banyaknya indikator pendukung dalam mendapatkan 1 kunjungan anak balita, banyak bidan desa yang hanya mengandalkan kunjungan anak balita yang ke posyandu saja sementara untuk anak yang sudah diatas 3 tahun, kunjungan posyandunya sudah menurun, serta kurangnya kunjungan bidan desa ke rumah untuk melakukan DDTK terhadap anak balita.

#### 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Dasar

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan pada usia dasar terkait dengan penjarangan anak sekolah jika dibandingkan dengan sasaran tidak tercapai pada tahun 2020 (27,81%) karena dampak dari pandemi covid-19. Kebijakan tentang pelaksanaan penjarangan kesehatan bagi sekolah keluar di akhir tahun, sehingga dengan keterbatasan anggaran, waktu dan petugas yang melaksanakan target tidak tercapai karena banyak kendala yang terjadi pada sekolah, seperti para siswa diliburkan, siswa ujian sekolah, dan libur semester.

#### 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan pada usia produktif terkait dengan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular jika dibandingkan dengan sasaran tidak tercapai pada tahun 2020 (12,14%) karena dampak dari pandemi Covid-19, kebijakan pelayanan kesehatan pada usia produktif memiliki kendala, diantaranya:

- a. Terkendala karena adanya kasus Covid-19
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke Posbindu
- c. Belum memadainya prasarana Posbindu Kit. Dari 20 puskesmas yang ada dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, yang memiliki posbindu kit saat ini baru 15 puskesmas.

- d. Masih kurangnya ketersediaan SDM untuk melaksanakan kegiatan posbindu
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan P2PTM

#### 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Permasalahan dalam pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut jika di bandingkan dengan sasaran tidak tercapai pada tahun 2020 (49,59%) yang seharusnya 100% Sehubungan dengan pandemi Covid 19, penduduk usia 60 tahun atau lebih merupakan sasaran yang rentan terhadap virus tersebut, sehingga pelayanan untuk kesehatan usia lanjut dibatasi.

#### 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan penderita hipertensi jika dibandingkan dengan sasaran tidak tercapai pada tahun 2020 (3,32%). Kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dalam 2 tahun terakhir terkendala karena adanya pandemi covid-19, kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang bahayanya penyakit hipertensi, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan. Dengan adanya sosialisasi dan kerjasama seluruh masyarakat, lintas program dan sektoral maka pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi diharapkan dapat dilaksanakan sesuai standar.

#### 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM) jika dibandingkan dengan sasaran tidak tercapai pada tahun 2020 (18,51%). Pelayanan kesehatan penderita DM terkendala karena adanya pandemi covid-19, kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang bahaya penyakit DM, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular. Pendekatan dan sosialisasi Standar Pelayanan Minimal tahun 2020 sangat penting dilakukan, terutama untuk kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko DM.

#### 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat jika dibandingkan dengan sasaran, tidak tercapai target SPM pada tahun 2020 (48,89%) terkendalanya karena pandemi covid-19 dan kurangnya kesadaran

dari masyarakat dan keluarga untuk mengambil obat pasien ODGJ ke fasilitas pelayanan kesehatan.

#### 11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis jika dibandingkan dengan sasaran, diperoleh hasil bahwa belum tercapai target SPM pada tahun 2020 (13,78%). Kendala dan permasalahan dalam pelayanan kesehatan pada indikator SPM ini adalah, sebagai berikut:

- a. Dari aspek lingkungan: adanya wabah covid-19 yang menjadikan kegiatan pelacakan kasus, kunjungan rumah dan pemeriksaan kontak tidak bisa dilakukan.
- b. Dari aspek SDM: adanya tugas rangkap dan pergantian petugas pengelola program di puskesmas yang sering terjadi.
- c. Dari aspek dana: Minimnya penganggaran dana untuk pelaksanaan program P2TBC di Dinas Kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- d. Dari aspek teknis: adanya pembaharuan aplikasi pelaporan yang berbasis online yang belum semua petugas di fasilitas pelayanan kesehatan bisa maksimal pengoperasiannya sehingga masih banyak kasus yang tidak masuk ke sistim pelaporan.

#### 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)

Kendala dan permasalahan dalam pelayanan kesehatan pada indikator SPM ini adalah:

- a. Dari aspek lingkungan: adanya wabah covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan program HIV tidak maksimal dilakukan.
- b. Dari aspek teknis: keterbatasan kemampuan menjangkau kelompok beresiko karena adanya stigma negatif tentang penyakit HIV di tengah masyarakat.
- c. Dari aspek manajemen: belum terbentuknya KPA HIV-AIDS di Kabupaten Pasaman Barat.
- d. Dari aspek pendanaan: Minimnya penganggaran untuk pelaksanaan program HIV di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan Puskesmas.

- e. Dari aspek promosi: Kurangnya sosialisasi tentang HIV-AIDS di masyarakat. Solusi untuk permasalahan di atas adalah dengan kerjasama semua pihak, dalam melakukan upaya promotif dan preventif, dan sosialisasi berkelanjutan tentang HIV-AIDS

**Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2016- 2021**

| No | Indikator Kinerja                              | Target NSPK | Target IKK | Tahun          |                |                |             |             |             | Realisasi Capaian Tahun |       |       |       |       |      | Rasio Capaian Pada Tahun |      |      |       |       |
|----|--|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------------|------|------|-------|-------|
|    |  |             |            | Realisasi 2016 | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | 2016                    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2016                     | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  |
| 1  | Rata-rata Usia Harapan Hidup                   |             |            | 67.1           | 67.2           | 67.4           | 67.5        | 67.7        | 67.85       | 67.09                   | 67.15 | 67.21 | 67.37 | 67.37 |      | 100                      | 100  | 100  | 99.81 | 99.51 |
| 2  | Prevalensi stunting                            |             |            | 22.4           | 21.9           | 21.4           | 20.9        | 20.4        | 19,90       | 22.4                    | 21.9  | 21.4  | 17.8  | 20.6  |      | 100                      | 100  | 100  | 85,1  | 99    |
| 3  | Angka kematian ibu per 100.000 penduduk        |             |            | 186            | 241            | 212            | 163         | 81          | 48,96       | 186                     | 241   | 212   | 163   | 219   |      | 100                      | 100  | 100  | 100   | 36.98 |
| 4  | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup   |             |            | 11,91          | 9.53           | 9.95           | 8.90        | 8.90        | 8.90        | 11.91                   | 9.53  | 9.95  | 8.90  | 12.08 |      | 100                      | 100  | 100  | 98.89 | 74.50 |
| 5  | Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup |             |            | 13.77          | 11.34          | 9.79           | 8,98        | 8,98        | 8.90        | 13.77                   | 11.34 | 9.79  | 9.94  | 1.06  |      | 100                      | 100  | 100  | 90.54 | 100   |
| 6  | Prevalensi penyakit menular                    |             |            | 3.38           | 3.27           | 2.88           | 2.58        | 2.36        | 2.36        | 3.38                    | 3.27  | 2.88  | 2.58  | 2.16  |      | 100                      | 100  | 100  | 100   | 91.53 |
| 7  | Prevalensi penyakit tidak menular              |             |            | N/A            | 45.85          | 100            | 100         | 100         | 100         | N/A                     | 45.8  | 100   | 2.23  | 1.83  |      | N/A                      | 100  | 100  | 2.23  | 1.83  |
| 8  | Persentase balita kurus (BB/TB)                |             |            | 17.09          | 1.55           | 1.93           | 4.60        | 4.60        | 4.60        | 17.09                   | 1.55  | 1.93  | 4.60  | 6.20  |      | 100                      | 100  | 100  | 100   | 74.19 |
| 9  | Persentase balita gizi buruk                   |             |            | 0.07           | 0.05           | 0.05           | 0.04        | 0.03        | 0.03        | 0.07                    | 0.05  | 0.05  | 0.04  | 2.10  |      | 100                      | 100  | 100  | 100   | 1.43  |
| 10 | Indeks Keluarga Sehat                          |             |            | N/A            | 0,09           | 0,10           | 0.11        | 0.10        | 0.10        | N/A                     | 0.09  | 0.10  | 0.11  | 0.10  |      | N/A                      | N/A  | 100  | 100   | 100   |
| 11 | Puskesmas yang terakreditasi                   |             |            | 3              | 8              | 17             | 20          | 20          | 20          | 3                       | 8     | 17    | 20    | 20    |      | 100                      | 100  | 100  | 100   | 100   |
| 12 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat               |             |            | 0              | 0              | Baik           | Baik        | Baik        | Baik        | 0                       | 0     | Baik  | Baik  | Baik  |      | 0                        | 0    | Baik | Baik  | Baik  |
| 13 | Nilai SAKIP                                    |             |            | B              | B              | B              | B           | B           | B           | C                       | C     | C     | C     | C     |      |                          |      |      |       |       |
| 14 | Nilai SPIP                                     |             |            | N/A            | N/A            | 2.5            | 2.7         | 2.8         | 2.8         | N/A                     | N/A   | 2.5   | 2,7   | 2,8   |      | N/A                      | N/A  | 100  | 100   | 100   |
| 15 | Opini Laporan Keuangan                         |             |            | N/A            | N/A            | WTP            | WTP         | WTP         | WTP         | WTP                     | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |      | 100                      | 100  | 100  | 100   | 100   |

*Sumber: RPJMDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 & Profil Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020*

Berdasarkan tabel T-C 23 dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Dinas kesehatan Tahun 2016-2021 secara keseluruhan dapat dikategorikan sudah hampir mencapai target kecuali indikator Prevalensi Penyakit Tidak Menular dan Persentase Balita Gizi Buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang penghambat dari capaian tersebut bisa disebabkan oleh faktor lingkungan dan kebiasaan. Munculnya suatu penyakit yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dapat mempengaruhi capaian program kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan.

Kondisi saat ini pandemi wabah Covid-19 juga mempengaruhi tidak tercapainya target indikator kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan yang ditetapkan pada periode renstra 2016-2021, dimana pada masa pandemi ini banyak program kegiatan pelayanan kesehatan yang ditunda pelaksanaannya bahkan tidak dapat dilaksanakan karena melibatkan pengumpulan banyak orang yang bertentangan dengan pelaksanaan Sosial distancing dan protocol kesehatan yang harus diterapkan dan dilaksanakan untuk menekan penyebaran dan penularan Virus Covid-19. Selain itu pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi pola pikir, kepercayaan dan perekonomian masyarakat, dimana masyarakat merasa takut untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan karena takut kontak dengan pasien yang terkonfirmasi virus, tertular virus covid-19 di fasilitas kesehatan, tidak dapat melaksanakan kegiatan bermasyarakat dan bekerja seperti biasa karena adanya pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah.

### **2.3.2 Kinerja Anggaran**

Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan berbeda-beda setiap tahunnya seperti disajikan dalam tabel T-C.24 berikut ini:

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020**

| No. | URUSAN / OPD / PROGRAM   | Indikator Kinerja   | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |            |            |            |            |            |            |                    |            |                    |            |                            |              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|-----|--|---|--------|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
|     |  |   |        |                      | Tahun 2016                                     |            | Tahun 2017 |            | Tahun 2018 |            | Tahun 2019 |            | Tahun 2020         |            | Tahun 2021         |            | Kondisi Kinerja Pada Akhir |              |                                   |        |
|     |  |   |        |                      | Realisasi                                      | Rp. (juta) | Realisasi  | Rp. (juta) | Realisasi  | Rp. (juta) | Target     | Rp. (juta) | Target             | Rp. (juta) | Target             | Rp. (juta) | Target                     | Rp. (juta)   |                                   | Target |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5                    | 6  | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14                 | 15         | 16                 | 17         | 18                         | 19           | 20                                |        |
|     | Belanja Tidak Langsung   |   |        |                      |  | 169.579.34 |            | 173.040.15 |            | 176.571.58 |            | 180.175.08 |                    | 183.778.58 |                    | 187.454.15 |                            | 1,070.598.88 |                                   |        |
|     | 1 Belanja Pegawai  |   |        |                      |  | 169.579.34 |            | 173.040.15 |            | 176.571.58 |            | 180.175.08 |                    | 183.778.58 |                    | 187.454.15 |                            | 1,070.598.88 |                                   |        |
|     | Belanja Langsung   |   |        |                      |  | 93.230.74  |            | 85.553.36  |            | 75.661.32  |            | 103.575.96 |                    | 124.691.90 |                    | 127.185.74 |                            | 609.899.02   |                                   |        |
|     | 1 Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                | %      | 100                  |  | 6.194.46   | 100        | 6.320.88   | 100        | 6.449.88   | 100        | 6.581.51   | 100                | 6.713.14   | 100                | 6.847.40   | 100                        | 39,107.28    | Dinkes                            |        |
|     | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur                     | %      | 100                  |  | 30,276.15  | 100        | 30,894.03  | 100        | 31,524.52  | 100        | 32,167.88  | 100                | 32,811.24  | 100                | 33,467.46  | 100                        | 191,141.29   | Dinkes                            |        |
|     | 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional                | %      |                      |  | 107.36     | 100        | 109.55     | 100        | 111.79     | 100        | 114.07     | 100                | 116.35     | 100                | 118.68     | 100                        | 677.80       | Dinkes                            |        |
|     | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Puskesmas                       | %      | 60                   | 60   |            | 50         |            | 44         |            | 60         |            | 65                 | 19,044.42  | 70                 | 19,425.31  | 70                         | 38,469.73    | Dinkes                            |        |
|     | Program Upaya Kesehatan Masyarakat   | Persentase Puskesmas dengan IKM minimal baik                              | %      | 74                   | 79   | 29,576.08  | 80         | 14,518.78  | 80         | 13,511.89  | 80         | 19,623.68  | 80                 | 20,016.15  | 80                 | 20,416.48  | 80                         | 117,663.06   | Dinkes                            |        |
|     | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan   | Persentase Puskesmas Terakreditasi  | %      | N/A                  | 16   | 242.53     | 25         | 932.73     | 45         | 2,134.68   | 100        | 1,135.31   | 100                | 1,158.02   | 100                | 1,181.18   | 100                        | 6,784.45     | Dinkes                            |        |
|     | Program obat dan perbekalan kesehatan  | Persentase ketersediaan obat esensial                                     | %      | 80                   | 80   | 3,664.21   | 85         | 3,581.84   | 85         | 5,575.73   | 100        | 3,800.66   | 100                | 3,876.67   | 100                | 3,954.21   | 100                        | 24,453.32    | Dinkes                            |        |
|     | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  | Angka kematian Ibu  | ratio  | 220.35               | 186.76   | 1,949.41   | 241.28     | 5,050.45   | 212.14     | 4,963.75   | 163.19     | 3,883.61   | 81.59              | 3,961.28   | 48.96              | 4,040.51   | 48.96                      | 23,849.01    | Dinkes                            |        |
|     |  | Angka Kematian Bayi   | ratio  | 12.31                | 11.91  |            | 9.53       |            | 9.95       |            | 8.98       |            | 8.98               | 8.98       |                    | 8.98       |                            | 8.98         |                                   | -      |
|     |  | Angka Kematian Balita   | ratio  | 14.00                | 13.77  |            | 11.34      |            | 9.79       |            | 8.98       |            | 8.98               | 8.98       |                    | 8.98       |                            | 8.98         |                                   | -      |
|     | Program Perbaikan Gizi Masyarakat  | Prevalensi Gizi Buruk   | ratio  | 0.08                 | 0.07   | -          | 0.05       | -          | 0.05       | -          | 0.04       | 133.72     | 0.03               | 136.39     | 0.03               | 139.12     | 0.03                       | 409.24       | Dinkes                            |        |
|     |  | Prevalensi Gizi Kurang  | ratio  | 15.00                | 14.00  |            | 13.00      |            | 12.6       |            | 11.00      |            | 11.00              | 10.00      |                    | 10.00      |                            | -            |                                   |        |
|     |  | Prevalensi Stunting   | ratio  | 13.00                | 22.40  |            | 21.90      |            | 21.40      |            | 20.90      |            | 20.40              | 19.90      |                    | 19.90      |                            | -            |                                   |        |
|     | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  | Persentase PHBS   | %      | 50                   | 40   | 289.80     | 52         | 385.40     | 55         | 96.56      | 60         | 204.75     | 65                 | 208.85     | 70                 | 213.02     | 70                         | 1,398.37     | Dinkes                            |        |
|     | Program pencegahan dan penganggulangan penyakit  | Prevalensi penyakit menular   | %      | 13,60                | 3,38   | 555.12     | 3,27       | 670.29     | 2,88       | 343.03     | 2,58       | 339.43     | 2,36               | 346.22     | 2,36               | 353.14     | 11,00                      | 2,607.24     | Dinkes                            |        |
|     |  | Prevalensi penyakit tidak menular   | %      | N/A                  | N/A  |            | 45.85      |            | 100.00     |            | 100.00     |            | 100.00             | -          | 100.00             | -          | 100.00                     | -            | Dinkes                            |        |
|     | Program pengembangan lingkungan sehat  | Persentase jorong Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)               | %      | 26                   | 42   | 518.03     | 42         | 499.87     | 63         | 197.66     | 84         | 949.40     | 84                 | 968.39     | 84                 | 987.76     | 84                         | 4,121.10     | Dinkes                            |        |
|     | Program pengawasan obat dan makanan  | Persentase kasus penggunaan obat dan bahan berbahaya yang ditindaklanjuti | %      | 80                   | 80   | 11.04      | 85         | 163.23     | 90         | 34.66      | 90         | 80.05      | 90                 | 81.65      | 90                 | 83.28      | 90                         | 453.92       | Dinkes                            |        |
|     | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia   | Persentase pelestarian Obat Tradisional                                   | %      | 100                  | 100  | 50.00      | 100        | 55.00      | 100        | 65.00      | 100        | 50.00      | tidak laksana 2020 | 51.00      | tidak laksana 2020 | 52.02      | 100                        | 323.02       | Dinkes                            |        |
|     | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin  | Cakupan pemenuhan Jaminan Kesehatan                                       | FKTP   | 19 FKTP              | 19 FKTP  |            | 19 FKTP    |            | 19 FKTP    |            | 19 FKTP    | 7,535.05   | 19 FKTP            | 7,685.75   | 19 FKTP            | 7,839.47   | 19 FKTP                    | 23,060.27    | Dinkes                            |        |
|     | Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga  | Cakupan penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan                          | %      | 56                   | 42   | 19,796.53  | 42         | 22,371.30  | 44         | 10,652.17  | 44         | 26,976.84  | 44                 | 27,516.38  | 44                 | 28,066.70  | 44                         | 135,379.93   | Dinkes                            |        |

| No        | Uraian  | Anggaran Pada Tahun   |                       |                        |                       |                       |                   | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |                       |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|
|           |   | Realisasi Tahun 2016  | Realisasi Tahun 2017  | Realisasi Tahun 2018   | Target Tahun 2019     | Target Tahun 2020     | Target Tahun 2021 | Tahun 2019                                | Tahun 2020            |
|           |   | Rp.                   | Rp.                   | Rp.                    | Rp.                   | Rp.                   | Rp.               | Rp.                                       | Rp.                   |
| 1         | 2   | 3                     | 4                     | 5                      | 6                     | 7                     | 8                 | 12  | 13                    |
| <b>I</b>  | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>   |                       |                       |                        |                       |                       |                   |   |                       |
|           | <b>Belanja Tidak Langsung</b>   | 169.579.340.000       | 173.040.150.000       | 176.571.580.000        | 180.175.080.000       | 183.778.580.000       | 187.454.150.000   |   |                       |
| <b>II</b> | <b>BELANJA LANGSUNG</b>   | <b>82.237.198.333</b> | <b>88.254.200.841</b> | <b>161.471.350.600</b> | <b>79.060.487.401</b> | <b>84.352.649.865</b> |                   | <b>68.115.170.262</b>                     | <b>66.325.516.168</b> |
| 1         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 6.194.460.000         | 6.320.880.000         | 6.449.880.000          | 6.581.510.000         | 6.713.140.000         | 6.847.400.000     | 1.358.571.427                             | 1.829.687.888         |
| 2         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 30.276.150.000        | 30.894.030.000        | 31.524.520.000         | 32.167.880.000        | 32.811.240.000        | 33.467.460.000    | 75.752.500                                | 11.860.500            |
| 3         | Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 107.360.000           | 109.550.000           | 111.790.000            | 114.070.000           | 116.350.000           | 118.680.000       | 180.204.737                               | 33.603.176            |
| 4         | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya | -                     | -                     | -                      | 34.192.612.701        | 35.863.156.500        |                   | 33.277.266.297                            | 27.972.671.808        |
| 3         | Program Upaya Kesehatan Masyarakat  | 29.576.082.783        | 14.518.778.400        | 13.511.891.000         | 23.120.005.800        | 23.157.331.000        |                   | 15.442.105.079                            | 16.420.774.648        |
| 10        | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  | 242.533.000           | 932.732.000           | 2.134.680.000          | 1.173.862.000         | 778.128.000           |                   | 969.501.259                               | 270.535.678           |
| 2         | Program obat dan perbekalan kesehatan   | 3.664.210.000         | 3.581.841.000         | 5.575.729.000          | 3.822.562.000         | 5.034.500.175         |                   | 3.601.795.904                             | 4.480.250.605         |
| 16        | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak   | 1.949.410.000         | 5.050.449.000         | 4.963.746.000          | 4.781.600.000         | 4.178.176.400         |                   | 3.825.068.231                             | 2.934.699.589         |
| 7         | Program perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan keluarga  | 104.267.900           | 197.695.000           | 24.157.000             | 113.717.100           | 25.875.000            |                   | 81.991.500                                | 11.204.000            |
| 6         | Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat   | 289.798.000           | 385.399.600           | 96.558.000             | 194.300.000           | 72.843.000            |                   | 183.689.500                               | 48.485.500            |
| 9         | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit  | 555.124.900           | 670.289.000           | 343.034.000            | 278.455.300           | 181.792.150           |                   | 242.983.386                               | 115.429.500           |
| 8         | Program Pengembangan Lingkungan Sehat   | 518.033.000           | 499.865.500           | 197.657.000            | 150.427.000           | 45.000.000            |                   | 96.895.950                                | 34.540.000            |
| 4         | Program Pengawasan Obat dan Makanan   | 110.411.900           | 163.233.000           | 34.649.600             | 71.055.000            | 229.635.000           |                   | 63.981.550                                | 67.323.900            |
| 5         | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia  | 15.130.000            | -                     | -                      | 29.500.000            | -                     |                   | 25.736.500                                | -                     |
| 11        | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin   | 39.875.500            | -                     | -                      | -                     | -                     |                   | -   | -                     |
| 12        | Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga   | 4.009.672.800         | 27.844.813.059        | 10.652.174.600         | 7.525.158.400         | 10.329.933.000        |                   | 7.255.302.515                             | 10.252.900.988        |

Berdasarkan tabel di atas, untuk rasio realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat bervariasi dari Tahun 2016-2021. Pada Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan keluarga, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan di tahun terakhir penghitungan yaitu tahun 2020 realisasi anggaran tidak mencapai 50% dari anggaran yang tersedia. Jika dibandingkan dengan capaian SPM Bidang Kesehatan pada indikator persentase balita gizi buruk yaitu yang hanya sebesar 1,43% salahsatu program pendukung untuk capaian indikator tersebut adalah program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran dan capaian target program serta indikator capaian terdapat hubungan yang menunjukkan adanya pengaruh penyerapan dana dengan pencapaian target program. Penyerapan dana yang baik, pemanfaatan segala sumber daya secara efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan capaian program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.

Kemudian pada program standarisasi pelayanan Kesehatan pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya mencapai 34,77%, salah satu kegiatan dari program ini merupakan kegiatan untuk menilai akreditasi Fasilitas Kesehatan Dasar yaitu 20 (dua puluh) Puskesmas yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, untuk tahun 2020 seluruh rencana kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak dapat dilaksanakan karena masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID 19) yang menyebabkan workshop dan survei ke lapangan sangat terbatas sehingga dilakukan penundaan kegiatan. Selain itu petunjuk teknis dari kegiatan akreditasi mengalami perubahan di pertengahan pelaksanaan kegiatan yang juga merupakan salah satu faktor terhalangnya pelaksanaan kegiatan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kesehatan adalah

bahwa dinamika pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threats* (ancaman).

**Tabel 2.11 Analisis S W O T**

| <b>Analisis S W O T</b>   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>   | <b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>  | <b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>  | <b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>  |
| 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, - RPJMD Kabupaten Pasmaan Barat Tahun 2021-2026 | 1. Regulasi Bidang Kesehatan yang masih minim   | 1. Adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan lokal spesifik      | 2. Kebutuhan Masyarakat atas Kesehatan sudah semakin berkembang dan beragam |
| 2. Anggaran yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan program dari berbagai sumber dana             | 2. Realisasi anggaran tidak tepat waktu sehingga ada beberapa kegiatan memiliki silva | 2. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, propinsi, daerah dalam upaya mendukung penganggaran program bidang kesehatan | 2. Ketepatan dan ketegasan dalam memperoleh dana masih kurang               |

| <b>Analisis S W O T</b>  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>  | <b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>                                    | <b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>   | <b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>   |
| 3. Adanya Standar pelayanan minimal bidang kesehatan (SPM)   | 3. Kegiatan untuk mencapai indikator belum tepat sasaran              | 3. Semakin bertambah pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra dalam peningkatan penyelenggaraan kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan                | 3. Target indikator SPM terlalu tinggi 100%  |
| 4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Juklak dan Juknis dan modul kegiatan program                      | 4. Pengetahuan tenaga kesehatan yang masih belum memadai              | 4. Semakin banyaknya UKBM sebagai bentuk peran serta masyarakat   | 4. Karakteristik penduduk yang heterogen di Kabupaten Pasaman Barat                              |
| 5. Tingkat pendidikan tenaga kesehatan sudah cukup memadai   | 5. Peran Serta dan kemitraan yang belum terjalin optimal              | 5. Adanya kerjasama lintas sektor bidang Kesehatan  | 5. Luasnya wilayah kabupaten Pasaman Barat dan geografis yang sulit                              |
| 6. Jumlah sarana kesehatan dasar dan rujukan, baik pemerintah maupun swasta cukup memadai                      | 6. Sistem pengawasan dan pengendalian program yang belum optimal      | 6. Kemudahan dalam komunikasi (via internet) untuk penanggulangan masalah-masalah kesehatan yang harus segera ditangani dan mempermudah koordinasi dengan lintas sektor terkait | 6. Laju pertumbuhan penduduk tinggi baik alami maupun migrasi serta tingginya mobilitas penduduk |
| 7. Adanya sistem informasi kesehatan yang berjenjang dari puskesmas ke Dinas Kesehatan sampai ke tingkat pusat | 7. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata | 7. Adanya layanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat   | 7. Jaringan internet di beberapa wilayah Pasaman Barat masih belum baik                          |

| <b>Analisis S W O T</b>   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>   | <b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>                                 | <b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>   | <b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>                                       |
| 8. Adanya kebijakan program Jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan BPJS | 8. Masih adanya data ganda masyarakat miskin dalam kepesertaan JKN | 8. Kemudahan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan                                  | 8. Masih ada masyarakat pasaman barat yang belum mendapat kartu BPJS |
| 9. Adanya sistem pembinaan secara berjenjang sampai tingkat wilayah (binwil & korwil)         | 9. Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan belum maksimal | 9. Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung | 9. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang                    |

Dari tabel di atas, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan seperti tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang, faktor lingkungan, karakteristik penduduk, dan lainnya. Akan tetapi, dengan adanya kerjasama dan sumber daya yang ada di bidang kesehatan diharapkan program kesehatan dapat berjalan dengan baik, dan target yang ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan menghadapi berbagai masalah seperti:

1. Masih adanya kematian pada ibu, bayi dan balita

Tahun 2020 terdapat 18 kasus kematian ibu di Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri dari 3 kasus kematian ibu hamil, 5 kasus kematian ibu bersalin dan 10 kasus kematian ibu nifas. Jumlah kematian ibu di tahun 2020 lebih tinggi dibanding tahun 2019 dengan 8 kasus kematian ibu. Tendensi kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup setiap tahunnya bervariasi, secara umum mengalami fase naik turun, seperti terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup  
Tahun 2012-2020**



Penyebab kematian ibu pada tahun 2020 antara lain karena 7 kasus kematian karena perdarahan, 5 kasus karena hipertensi dalam kehamilan, 2 kasus karena infeksi, 2 kasus karena gangguan metabolik dan 2 kasus karena penyebab lainnya. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi peningkatan AKI dan AKB di Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- a. Kerjasama semua pihak terkait, baik lintas program dan lintas sektoral, keluarga, masyarakat, dan dukungan dari pemerintah daerah.
- b. Pendampingan ibu hamil risiko tinggi untuk meningkatkan deteksi dini kehamilan resiko tinggi dan memudahkan rujukan maternal.
- c. Peningkatan kualitas *Antenatal care* (ANC) dengan mengadakan pelatihan bidan, berupa Asuhan Persalinan Normal (APN), Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- d. Meningkatkan kompetensi dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan dan saat hamil, serta mengidentifikasi masalah kesehatan pada perempuan pra hamil dan ibu hamil.
- e. Meningkatkan kompetensi dokter untuk kerja tim bersama bidan dan perawat dalam penatalaksanaan persalinan, tatalaksana komplikasi yang muncul saat persalinan serta melakukan rujukan secara tepat dan cepat.
- f. Meningkatkan kompetensi dalam menerima rujukan ANC ibu dengan komplikasi obstetri dan komplikasi medis sesuai dengan kondisi ibu.
- g. Meningkatkan kompetensi dalam menerima rujukan kehamilan atau persalinan dengan kondisi gawat darurat dan melakukan tatalaksana secara tepat dan cepat.
- h. Penataan sistem rujukan berdasarkan regional daerah dan kemampuan fasilitas kesehatan.
- i. Perlunya diadakan lomba penurunan AKI/ AKB di setiap Puskesmas untuk meningkatkan peran serta semua pihak di wilayah kerja masing-masing puskesmas.

## 2. Masih rendahnya status gizi

Penilaian tingkat status gizi balita dilakukan melalui perhitungan indeks berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan per tinggi badan (BB/TB). Indeks BB/U digunakan untuk mengetahui kondisi balita gizi kurang atau tidak. Sementara indeks TB/U untuk mengetahui balita tersebut pendek atau tidak. Selanjutnya indeks TB/BB digunakan untuk memetakan status balita kurus atau tidak. Pemetaan status gizi balita ini dapat mengarahkan kepada data balita gizi buruk.

Balita dengan gizi buruk adalah balita yang kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan bergizi atau menderita penyakit kronis. Kondisi gizi buruk adalah dengan status gizi sangat kurus (BB/TB) dan atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala marasmus, kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor. Penanggulangan kasus balita gizi buruk dilakukan dengan pemberian PMT berupa susu, biskuit MP-ASI dan bubur susu.

Data status gizi balita rincian status gizi balita di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 adalah dari 36.584 balita yang ditimbang ditemukan 13% balita gizi kurang (4.762 jiwa), 20,9% balita pendek (7.631 jiwa) dan 8,3% balita kurus (3.035 jiwa).

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pasaman Barat. Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagaimana tabel berikut:

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pasaman Barat. Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Bidang Kesehatan Untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kesehatan**

| No | Masalah pokok   | Masalah  | Akar Masalah  |
|----|---|--|---|
| 1  | Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan | <p>1. Pada pelayanan kesehatan ibu hamil Tidak sesuai data real dan data pusdatin</p> <p>2. Pelayanan kesehatan ibu hamil Adanya kematian pada</p> | <p>- Kurangnya validasi dan evaluasi dari laporan yang real dari seluruh pelayanan kesehatan ibu hamil.</p> <p>- Kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan dipelayanan kesehatan dengan adanya pandemic covid 19.</p> <p>- Adanya kematian ibu disebabkan perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi penyakit penyerta baik menular dan</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | ibu hamil  | <p>tidak menular.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya faktor risiko pada ibu hamil dengan kelompok umur berisiko, kekurangan energi kronik dan anemia</li> </ul>  |
|  |  | <p>3. Pelayanan kesehatan bayi baru Adanya kematian pada bayi baru lahir.</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada pertolongan persalinan oleh bukan tenaga kesehatan di wilayah tertentu Masih kurangnya pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang kesehatan ibu dan anak.</li> <li>- Adanya kematian bayi baru lahir dan bayi disebabkan Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, kelainan bawaan, ikterus dan penyebab lainnya, penyakit penyerta (pneumonia, diare, kelainan saluran cerna, sepsis, kelainan saraf dan kelainan kongenital</li> </ul> |
|  |  | <p>4. Kesehatan anak balita Adanya kematian balita , masih rendahnya status gizi masyarakat (Stunting)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kematian balita disebabkan penyakit menular yaitu diare, pneumonia, campak dan lainnya.</li> <li>- Masih ada balita yang belum mendapatkan Imunisasi dasar lengkap.</li> <li>- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan ibu dan anak</li> <li>- Masih adanya masalah gizi pada ibu hamil, bayi dan balita.</li> <li>- Belum optimalnya pelayanan gizi dimasyarakat.</li> </ul>   |
|  |  | <p>5. Pelayanan kesehatan pada usia dasar. Belum adanya posyandu usia</p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya posyandu remaja sehingga tidak terdata dengan jelas pelayanan pada usia remaja tersebut.</li> <li>- Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung</li> </ul>  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | sekolah pada anak putus sekolah.  | kegiatan posyandu remaja putus sekolah.   |
|  |  | 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif Semakin meningkatnya factor resiko PTM   | - Kurangnya SDM baik tenaga kesehatan maupun masyarakat terkait kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan deteksi dini factor resiko penyakit tidak menular dimasyarakat.   |
|  |  | 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Kurangnya tingkat kemandirian lansia   | - Kurangnya SDM dari tenaga kesehatan dibidang pelayanan gerontik.<br>- Kurangnya tingkat kemandirian dan kemauan dari pendamping lansia.   |
|  |  | 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular prioritas yaitu hipertensi      | Penyakit Hipertensi :<br>Gaya hidup yang tidak sehat:<br>- Merokok<br>- Minum minuman beralkohol<br>- Sering makan makanan asin<br>- Sering makan makanan tinggi Lemak<br>- Kurang makan sayur<br>- Kurang makan buah<br>- Kurang aktivitas fisik<br>- Obesitas         |
|  |  | 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular prioritas yaitu Diabetes | Penyakit Hipertensi :<br>Gaya hidup yang tidak sehat:<br>- Minum minuman beralkohol<br>- Sering makan makanan tinggi Lemak<br>- Sering makan/minum makanan/minuman manis-manis<br>- Kurang makan sayur<br>- Kurang makan buah<br>- Kurang aktivitas fisik<br>- Obesitas |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | <p>Melitus</p> <p>10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat<br/>Kecendrungan meningkatnya kasus ODGJ dan ODMK</p> <p>11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis (TB)<br/>Masih banyaknya penderita TB yang belum mendapat pengobatan</p> <p>12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi <i>human immunodeficiency virus (HIV)</i><br/>Adanya stigma jelek dimasyarakat.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor sosial ekonomi</li> <li>- Tenaga kesehatan kurang terlatih</li> <li>- Akses penderita ke pelayanan masih rendah</li> <li>- Pengaruh globalisasi</li> <br/> <li>- Kurangnya pelacakan kasus TB dimasyarakat</li> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan difasilitas kesehatan.</li> <br/> <li>- Masihnya banyak penderita yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan disebabkan karena kurang kesadaran penderita HIV (stigma) dimasyarakat.</li> <li>- Kurangnya sosialisasi tentang HIV dimasyarakat</li> <li>- KPA belum ada dikabupaten pasaman barat</li> <li>- SDM kesehatan yang kurang terlatih dibidan penyakit HIV.</li> <li>- Lintas sektor belum terjalin dengan baik</li> <li>- Populasi kunci belum terjangkau, contohnya lapas, BNK, PSK komunitas LGBT.</li> </ul> |
| 2 | Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana | Pengelolaan data Informasi kesehatan masih belum optimal dalam   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribusi nakes yang belum merata dan tidak sesuai dengan anjab ABK</li> <li>- Kebijakan pemerintah daerah</li> </ul>   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | kesehatan   | mendukung pelayanan kesehatan  | <p>dan kepala dinas yang menempatkan pegawai tidak berpedoman pada anjab ABK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua jabatan fungsional memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)</li> <li>- Pendidikan dan latihan yang masih terbatas sesuai kebutuhan</li> <li>- Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM pendukung.</li> <li>- Integrasi data satu pintu masih manual dan parsial</li> <li>- Kurangnya komitmen pimpinan dalam mendukung penerapan sistem informasi di Puskesmas dan RS (simpus, e-SIR, website, dll)</li> </ul> |
| 3 | Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dan peduli dalam menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan | Akses masyarakat terhadap air bersih dan air minum yang memenuhi syarat masih rendah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa daerah belum memiliki akses terhadap air bersih</li> <li>- Setiap rumah belum memiliki akses untuk sarana air bersih</li> <li>- Masalah rendahnya sanitasi masyarakat</li> </ul>  |
| 4 | Pandemi Covid-19 berkontribusi terhadap penurunan layanan kesehatan di Semua aspek                                | Menurunnya pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pandemi covid -19 menyebabkan aktifitas/ kegiatan yang melibatkan masyarakat/mengumpulkan orang banyak dibatasi.</li> <li>- Masyarakat takut untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan ataupun posyandu karena pandemi</li> <li>- Kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang dampak penyebaran covid-19</li> </ul>   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 5 | Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan rujukan. | Belum optimalnya akses dan pelayanan kesehatan dasar di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)<br><br>Belum optimalnya akses dan pelayanan pada tingkat rujukan | - Masih ada beberapa wilayah yang kurang mendapatkan akses ke sarana kesehatan<br>- Masih ada puskesmas yang belum terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan |
|---|---|---|---|

Meningkatnya angka kematian ibu disebabkan oleh banyak faktor, namun kematian ibu ini dapat dikendalikan jika kualitas pemeriksaan kesehatan ibu hamil bagus, sehingga identifikasi faktor risiko dapat diketahui dari awal dan tindakan pencegahan dapat disiapkan. Komplikasi yang terjadi pada saat ibu hamil, melahirkan dan nifas dapat ditangani dengan baik jika tenaga kesehatan mempunyai keterampilan sesuai dengan standar, alat kesehatan cukup dan tersedia lengkap, dan ibu hamil beserta keluarga mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melahirkan dengan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan sehingga apabila terjadi penyulit atau hal-hal yang tidak diinginkan, upaya tindak lanjut dapat dilakukan sesegera mungkin.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk periode jangka menengah mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang diperoleh melalui penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh seluruh warga Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang.

Berikut ini visi jangka menengah pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 adalah:

***“Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”***

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan 3 misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif,
2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing,
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif.

Penetapan tujuan, sasaran pembangunan didasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

**Tabel 3.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat**  
**dengan Dinas Kesehatan**  
**Tahun 2021-2026**

| <b>Visi : “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>Misi</b>  | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator</b>   |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif                      | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan                        | Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan |
|  |   | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan  |
|  |   | Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan   |
| Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing   | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                 | Angka Kematian Ibu (AKI)<br>Angka Kematian Bayi (AKB)                        |
|  |   | Prevalensi Stunting<br>Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan               |
|  | Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Persentase Rumah Tangga ber-PHBS   |

Sumber : RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas, tujuan dari Dinas Kesehatan adalah untuk penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif; meningkatnya kualitas pelayanan publik; serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan program sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- 4) Program sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman
- 5) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Kesehatan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian

Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di Kabupaten. Sasaran dan indikator Kemenkes juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan permasalahan di Dinas Kesehatan Kabupaten terkait Sasaran Kemenkes dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.3

**Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L  | Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten  | Sebagai Faktor   |  |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
|    |                                      |  | Penghambat   | Pendorong  |
| 1  | 2                                    | 3  | 4  | 5  |
|    | <b>Renstra Kementerian Kesehatan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam hal keterkaitan program dan pendanaan</li> <li>2. Kualitas lulusan tenaga kesehatan belum siap pakai</li> <li>3. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang seringkali tidak tepat waktu</li> <li>4. Akreditasi, sertifikasi dan registrasi menjadi kewenangan pusat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah</li> <li>2. Belum ada standarisasi kompetensi lulusan tenaga kesehatan</li> <li>3. Penerbitan e-katalog dan alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu</li> <li>4. Belum optimalnya implementasi perencanaan melalui e-planning dan e-renggar</li> <li>5. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Sumatera Barat umumnya dan Kabupaten Pasaman Barat pada khususnya</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akreditasi institusi pendidikan kesehatan</li> <li>2. Regulasi tentang Internship lulusan dokter umum</li> <li>3. UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan</li> </ol> |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa beberapa masalah yang ditemukan antara lain adalah belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah, masalah kualitas tenaga kesehatan.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

| No | Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan   | Permasalahan Pelayanan SKPD   | Faktor   |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   |   | Penghambat   | Pendorong   |
| 1. | 1. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pembangunan gedung administrasi dan gedung pelayanan dasar<br>2. Peningkatan SPAL (Sarana Pembuangan Air limbah)<br>3. Peningkatan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga<br>4. Pemantauan dan Pengamatan terhadap perkembangan penyakit berbasis yang berkaitan dengan iklim/ cuaca<br>5. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi<br>6. Pengembangan Tanaman Obat | 1. Pembangunan kesehatan belum berwawasan lingkungan<br>2. Belum ada juknis tentang pembangunan berwawasan lingkungan<br>3. Belum adanya kesatuan gerak dengan sektor lain dalam peningkatan lingkungan sehat | 1. Lemahnya koordinasi dengan sektor lain dalam peningkatan lingkungan sehat<br>2. Kurangnya kompetensi sumber daya tenaga | 1. Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan adalah pembangunan berwawasan kesehatan<br>2. Banyaknya lintas sektor mempunyai tupoksi terkait lingkungan |

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan SKPD, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan.

**Tabel 3.5**  
**Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2021 - 2026**

| <b>Tupoksi</b>  | <b>Permasalahan</b>  | <b>Isu Strategis</b>  |
|---|--|---|
| 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan   | 1. Masih tingginya angka kematian bayi<br>2. Masih tingginya angka kematian ibu<br>3. Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang dan <i>stunting</i><br>4. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular<br>5. Masih tingginya kasus gangguan jiwa | 1. Menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan ibu hamil dan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang dan <i>stunting</i> serta menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular<br>2. Meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk sektor swasta dan LSM karena sangat dibutuhkan sebagai mitra dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada tahap promosi dan pencegahan |
| 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan   | 6. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas  | 3. Tersedianya obat di UPT Puskesmas dan jaringannya serta meningkatnya pelayanan kefarmasian.  |
| 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan kesehatan meliputi urusan bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan sumber daya kesehatan | 7. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan  | 4. Peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM Dinas Kesehatan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) | 8. Belum optimalnya mutu unit pelayanan teknis Dinas (UPTD) | 5. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan di UPTD Puskesmas<br>6. Peningkatan status Akreditasi Puskesmas |
|---|---|---|

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM yang kurang merata
2. Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum memenuhi standar
3. Konsumsi/asupan zat gizi yang masih rendah di tambah dengan adanya penyakit infeksi yang mendorong balita kekurangan gizi/menjadi gizi buruk
4. Pergantian petugas kesehatan/pengelola program di masing-masing bidang, yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas yang baru
5. Pembiayaan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk program
6. Perubahan iklim yang mempengaruhi virulensi agen
7. Ketersediaan sarana dan prasarana program yang belum terpenuhi secara terus menerus
8. Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan risiko penyakit tidak menular
9. Fasilitas/sarana prasarana belum memadai
10. Koordinasi lintas program belum terpadu
11. Belum optimalnya kebijakan publik yang mendukung PHBS
12. Belum maksimalnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
13. Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus
14. Pembiayaan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk meningkatkan capaian kinerja kesehatan
15. Masih rendahnya komitmen lintas program terhadap pengelolaan data satu pintu

Setelah menemukan permasalahan dalam pelayanan yang dilakukan dinas kesehatan, maka akan dilihat juga permasalahan atau isu-isu strategis secara luas

yaitu isu internasional, nasional, regional maupun isu lainnya yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong atau menghambat dalam pelayanan, yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

| <b>Isu Strategis</b>                                    |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
| <b>Dinamika Internasional</b>                           | <b>Dinamika Nasional</b>  | <b>Dinamika Regional/ Lokal</b>   | <b>Lain-Lain</b> |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)              |
| 1. AFTA ( <i>Asean Free Trade Area</i> )                | 1. Otonomi daerah   | 1. Semakin banyaknya jumlah tenaga kesehatan dan tidak kompeten   |                  |
| 2. MDGS ( <i>Millenium Developments Goals</i> )         | 2. Regulasi kementerian kesehatan belum semua mendukung daerah                          | 2. Belum adanya pemerataan tenaga kesehatan   |                  |
| 3. <i>Universal coverage</i>                            | 3. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berkembang pesat                           | 3. Perizinan, standarisasi dan akreditasi pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan                         |                  |
| 4. <i>Frame Convention</i>                              | 4. Kebijakan JKN  | 4. Persaingan fasilitas pelayanan kesehatan   |                  |
| 5. <i>Tobacco Control (FTCT)</i>                        | 5. Indikator MDGs yang berakhir tahun 2015 dan ada beberapa yang masih <i>off track</i> | 5. Belum semua masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan   |                  |
| 6. <i>Global Warming (Pemanasan Global)</i>             | 6. Kebijakan cukai dan pajak rokok  | 6. Kerjasama lintas sektor dalam upaya kesehatan belum optimal  |                  |
| 7. Konvensi ILO AEC ( <i>ASEAN Economic Community</i> ) | 7. Perubahan lingkungan menyebabkan bencana alam dan sosial                             | 7. Tingginya perilaku merokok dan pola makan tidak sehat  |                  |
| 8. Hak Azazi Manusia (HAM)                              | 8. Pengarusutamaan gender   | 8. Kondisi lingkungan umum, lingkungan kesehatan kurang mendukung.  |                  |
|   |   | 9. Perubahan gaya hidup, konsumsi makanan dan bahan makanan tambahan dengan pengawasan yang belum optimal |                  |

Isu strategis dari lingkungan luar yang mempengaruhi pelayanan kesehatan dari dinamika internasional, dinamika nasional dan regional, seperti adanya pemanasan global yang berdampak panjang bagi dunia kesehatan, target MDGs yang

saat ini belum tercapai sehingga dilanjutkan dengan SDG's (*Sustainable Development Goals*). Selain itu adanya perubahan pola hidup masyarakat yang mengkonsumsi makanan cepat saji, kurang aktifitas fisik, merokok dan gaya hidup yang tidak sehat lainnya yang menambah beban kesehatan dengan tetap banyaknya kasus penyakit menular ditambah dengan meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM).

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

#### **4.1. Tujuan**

Dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dirumuskan bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun ke depan. Dalam mencapai visi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap misi mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan melayani dengan tujuan penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik; peningkatan kualitas sarana kesehatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju sembuh dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; membangun sarana dan prasarana air bersih sehingga masyarakat mudah mendapatkan air bersih dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

#### **4.2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan pada lingkup OPD Dinas Kesehatan dengan indikator Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Dinas Kesehatan, Penurunan jumlah Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Stunting, Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan indikator Persentase Rumah Tangga ber-PHBS.

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Pasaman Barat Tahun 2021-2026**

| No | Tujuan   | Sasaran  | Indikator Tujuan/<br>Sasaran  | Kondisi<br>Awal | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun |      |      |      |      |      |
|----|--|--|---|-----------------|---|------|------|------|------|------|
|    |  |  |   |                 | 2020                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1  | 2  | 3  | 5   | 6               | 7   | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 1  | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan |  | Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan |                 | 50  | 50   | 75   | 75   | 100  | 100  |
|    |  |  | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan   | C               | B   | B    | B    | B    | B    | B    |
|    |  |  | Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan  | 2               | 3   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
|    |  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada lingkup OPD Dinkes | Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan |                 | 50  | 50   | 75   | 75   | 100  | 100  |
|    |  |  | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan   | C               | B   | B    | B    | B    | B    | B    |
|    |  |  | Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan  | 2               | 3   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

|    |   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |
|----|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2. | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                 |  | Usia Harapan Hidup  |       | 67,82 | 67,77 | 67,87 | 67,97 | 68,07 | 68,17 |
|    | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                 |  | Angka Kematian Ibu (AKI) (dihitung per 100.000 kelahiran hidup) | 219   | 210   | 205   | 200   | 190   | 183   | 175   |
|    |   |  | Angka Kematian Bayi (AKB) (dihitung per 1000 kelahiran hidup)   | 12.08 | 11.5  | 11.3  | 11.2  | 11.1  | 11.0  | 11.0  |
|    |   |  | Prevalensi Stunting   | 20,60 | 19,00 | 17,00 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 13,00 |
|    |   |  | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan                         | 40.36 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |  | Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)                            | 54,5  | 70    | 70    | 70    | 75    | 75    | 75    |

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan untuk lima tahun mendatang, yaitu sebagai berikut :

**Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026**

| TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI   | KEBIJAKAN   |
|---|--|--|---|
| 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Lingkup OPD Dinkes | Pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien                   | 1.1.1 Penerapan sistem money follow program Reformasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan<br>1.1.2 Menjamin ketersediaan SDM aparatur yang professional  |
|   |  | Pematangan sistem pengendalian internal pemerintah daerah untuk meminimalisir ketidakpatuhan | 1.1.3 Mengoptimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat<br>1.1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien |

| TUJUAN                                       | SASARAN                                   | STRATEGI   | KEBIJAKAN  |
|--|---|--|--|
| 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas Kesehatan</li> <li>2. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi</li> <li>3. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas Kesehatan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko kematian</li> <li>2. Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI (Universal Child Immunization)</li> <li>3. Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS;</li> </ol>  |
|  |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan cakupan ASI eksklusif</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting</li> <li>2. Penguatan sistem surveilans gizi</li> <li>3. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan</li> <li>4. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi</li> </ol> |

| TUJUAN | SASARAN   | STRATEGI  | KEBIJAKAN   |
|--------|---|---|---|
|        |   | 5. Meningkatkan Capaian Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan<br>6. Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus | 1. penguatan pelayanan kesehatan dasar ( <i>primary health care</i> ) dengan mengutamakan UKM dan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta                |
|        | Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 1. pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)  | 1. Penguatan kampanye nasional dan strategi komunikasi untuk perubahan perilaku sampai pada keluarga (sistem PIS-PIK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam tabel T.C.27.berikut:

Tabel T.C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 - 2026

| Tujuan                                    | Sasaran | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)  | Data Capaian Awal Perencanaan   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                 |                                 |                   |                                 |                   |                                 |                   |                                 |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi             |   |    |
|---|---------|--------------|---|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------------|---|----|
|   |         |              |   |   |                                 | Tahun-1                                       |                                 | Tahun-2                         |                   | Tahun-3                         |                   | Tahun-4                         |                   | Tahun-5                         |                   |   |                    | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |    |
|   |         |              |   |   |                                 | Target  | Rp                              | Target                          | Rp                | Target                          | Rp                | Target                          | Rp                | Target                          | Rp                |   |                    | Target  | Rp |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat |         |              |   | Usia Harapan Hidup  | 67.85 TAHUN                     | 67.87 TAHUN                                   |                                 | 67.97 TAHUN                     |                   | 68.07 TAHUN                     |                   | 68.17 TAHUN                     |                   | 68.27 TAHUN                     |                   | 68.27 TAHUN                                 |                    |   |    |
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |         |              |   | Angka Kematian Ibu (AKI)<br>Angka Kematian Bayi (AKB)<br>Prevalensi Stunting<br>Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan       | 210<br>11.5<br>20.60 %<br>100 % | 205<br>11.3<br>19.00 %<br>100 %               | 200<br>11.2<br>17.00 %<br>100 % | 190<br>11.2<br>14.00 %<br>100 % |                   | 183<br>11.1<br>13.50 %<br>100 % |                   | 175<br>11.0<br>13.00 %<br>100 % | 34.968.181,00     | 175<br>11.0<br>13.00 %<br>100 % |                   |   |                    |   |    |
|   |         | 1.02.02      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                       | % Pencapaian SPM Bidang Kesehatan   | 100 %                           | 100 %   | 60.893.696.836,00               | 100 %                           | 63.938.381.736,00 | 100 %                           | 67.122.800.365,00 | 100 %                           | 70.469.133.339,00 | 100 %                           | 74.016.669.157,00 | 100 %                                       | 336.440.681.433,01 |   |    |
|   |         | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota       | Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana, obat, Vaksin dan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan | 80 %                            | 80 %  | 22.922.804.931,00               | 80 %                            | 24.122.345.882,00 | 80 %                            | 25.208.727.847,00 | 80 %                            | 26.578.758.544,00 | 80 %                            | 27.838.789.865,00 | 80 %  | 126.671.427.069,00 | Dinas Kesehatan   |    |
|   |         |              | Pembangunan Puskesmas   | Jumlah puskesmas yang dilakukan pembangunan   | N/A                             | 2 Paket                                       | 8.199.204.622,00                | 4                               | 8.499.204.622,00  | 4                               | 8.959.304.429,00  | 2 Paket                         | 9.446.220.000,00  | 2 Paket                         | 9.881.613.395,00  | 2 Paket                                     | 44.985.547.088,00  |   |    |
|   |         |              | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah pembangunan fasilitas kesehatan lainnya  | 1 Paket                         | 1 Paket                                       | 866.994.757,00                  | 1 Paket/ Unit                   | 866.994.757,00    | 1 Paket/ Unit                   | 913.929.046,00    | 1 Paket/ Unit                   | 963.598.783,00    | 1 Paket/ Unit                   | 1.008.012.795,00  | 1 Paket/ Unit                               | 4.619.530.138,00   |   |    |
|   |         |              | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan  | Jumlah pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan   | 1 Paket                         | 1 Paket                                       | 339.676.025,00                  | 1 Paket/ Unit                   | 339.676.025,00    | 1 Paket/ Unit                   | 358.064.206,00    | 1 Paket/ Unit                   | 377.524.086,00    | 1 Paket/ Unit                   | 394.924.855,00    | 1 Paket/ Unit                               | 1.809.865.197,00   |   |    |
|   |         |              | Pengembangan Rumah Sakit  | Jumlah sarana rumah sakit (RS Ujung Gading) yang dilakukan pengembangan   | N/A                             | 1 kegiatan                                    | 562.798.695,00                  | 1 Paket/ Unit                   | 562.798.695,00    | 1 Paket/ Unit                   | 593.265.494,00    | 1 Paket/ Unit                   | 625.507.976,00    | 1 Paket/ Unit                   | 654.338.775,00    | 1 Paket/ Unit                               | 2.998.709.635,00   |   |    |
|   |         |              | Pengembangan Puskesmas  | Jumlah sarana puskesmas yang dilakukan pengembangan   | 2 Paket                         | 5 Paket                                       | 2.143.521.329,00                | 4                               | 2.443.521.329,00  | 4                               | 2.575.800.023,00  | 4                               | 2.715.788.250,00  | 4                               | 2.840.963.851,00  | 4   | 12.719.594.782,00  |   |    |
|   |         |              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah Pustu yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan di lingkungan dinas kesehatan                                       | N/A                             | 2 Paket                                       | 849.920.462,00                  | 2 Unit/ Paket                   | 849.920.462,00    | 2 Unit/ Paket                   | 895.930.442,00    | 2 Unit/ Paket                   | 944.622.000,00    | 2 Unit/ Paket                   | 988.161.339,00    | 2 Unit/ Paket                               | 4.528.554.705,00   |   |    |
|   |         |              | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                   | Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan  | 1 Paket                         | 23 Paket                                      | 77.874.493,00                   | 23 unit/ Paket                  | 77.874.493,00     | 23 unit/ Paket                  | 82.090.186,00     | 23 unit/ Paket                  | 86.551.581,00     | 23 unit/ Paket                  | 90.540.900,00     | 23 unit/ Paket                              | 414.931.653,00     |   |    |
|   |         |              | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungjung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      | Jumlah puskesmas yang mendapatkan pengadaan alat kesehatan/ alat pemungjung medik fasilitas pelayanan                         | 20 Paket                        | 20 Paket                                      | 4.736.890.493,00                | 20 Unit/ Paket                  | 5.236.890.493,00  | 20 Unit/ Paket                  | 5.520.386.704,00  | 20 Unit/ Paket                  | 5.820.405.780,00  | 20 Unit/ Paket                  | 6.088.678.829,00  | 20 Unit/ Paket                              | 27.403.252.299,00  |   |    |
|   |         |              | Pengadaan Bahan Habis Pakai   | Cakupan Ketersediaan Perbekalan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan   | 20 Puskesmas                    | 20 Puskesmas                                  | 1.547.632.334,00                | 100                             | 1.547.173.285,00  | 100                             | 1.630.928.666,00  | 100                             | 1.719.565.520,00  | 100                             | 1.798.823.411,00  | 100   | 8.244.123.216,00   |   |    |
|   |         |              | Pengadaan Obat, Vaksin  | Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin di lingkungan Dinas Kesehatan  | 20 Puskesmas/ 100%              | 20 Puskesmas                                  | 3.279.553.459,00                | 100                             | 3.379.553.459,00  | 100                             | 3.562.503.742,00  | 100                             | 3.756.116.824,00  | 100                             | 3.929.243.054,00  | 100   | 17.906.970.538,00  |   |    |
|   |         |              | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara   | 2 Paket                         | 3 Paket                                       | 208.197.420,00                  | 3 Paket                         | 208.197.420,00    |                                 |                   |                                 |                   | 34.968.181,00                   |                   | 451.363.021,00                              |                    |   |    |
|   |         |              | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Pemungjung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala serta kalibrasi   | 1 Paket                         | 1 Paket                                       | 110.540.842,00                  | 1 Paket                         | 110.540.842,00    | 1 Paket                         | 116.524.909,00    | 1 Paket                         | 122.857.744,00    | 1 Paket                         | 128.520.480,00    | 1 Paket                                     | 588.984.817,00     |   |    |
|   |         | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota              | Cakupan terpenuhinya pendukung dan pemungjung operasional di lingkungan Dinas Kesehatan                                       | 100%                            | 100 %   | 37.365.804.743,00               | 100 %                           | 39.169.450.706,00 | 100 %                           | 41.516.381.848,00 | 100 %                           | 43.474.977.534,00 | 100 %                           | 45.734.643.568,00 | 100 %                                       | 207.261.258.399,00 | Dinas Kesehatan   |    |
|   |         |              | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar   | 58,60%                          | 1   | 153.029.346,00                  | 1                               | 153.029.346,00    | 1                               | 162.247.302,00    | 1                               | 169.940.007,00    | 1                               | 178.815.215,00    | 1   | 817.061.216,00     | Seksi Kesga dan Gizi  |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                          | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |  |
|--------|---------|------|---|---|-------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---|---|--------|--|
|        |         |      |   |   |                               | Tahun-1                                       |                  | Tahun-2         |                  | Tahun-3         |                  | Tahun-4         |                  | Tahun-5         |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |   |        |  |
|        |         |      |   |   |                               | Target  | Rp               | Target          | Rp               | Target          | Rp               | Target          | Rp               | Target          | Rp               | Target  |   |        | Rp   |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar                                       | 72,90%                        | 1   | 2.755.843.011,00 | 1               | 2.852.393.240,00 | 1               | 3.024.211.497,00 | 1               | 3.167.599.820,00 | 1               | 3.333.029.410,00 | 1   | 15.133.076.978,00                           |        |  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Persentase Bayi Baru Lahir (BBL) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                | 95,10%                        | 100   | 114.447.418,00   | 100             | 114.447.418,00   | 1               | 121.341.340,00   | 1               | 127.094.550,00   | 1               | 133.732.126,00   | 1   | 611.062.852,00                              |        |  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                               | 70%                           | 1   | 75.361.959,00    | 1               | 75.361.959,00    | 1               | 79.901.511,00    | 1               | 83.689.907,00    | 1               | 88.060.658,00    | 1   | 402.375.994,00                              |        |  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  | Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar       | 27,8%                         | 1   | 27.742.811,00    | 1               | 27.742.811,00    | 1               | 29.413.941,00    | 1               | 30.808.558,00    | 1               | 32.417.552,00    | 1   | 148.125.673,00                              |        | Seksi Promkes  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | Persentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar              | 12,14%                        | 1   | 22.194.248,00    | 1               | 22.194.248,00    | 1               | 23.531.153,00    | 1               | 24.646.846,00    | 1               | 25.934.041,00    | 1   | 118.500.536,00                              |        | Seksi P2PTM  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | Persentase Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | 49,6%                         | 1   | 22.194.248,00    | 1               | 22.194.248,00    | 1               | 23.531.153,00    | 1               | 24.646.846,00    | 1               | 25.934.042,00    | 1   | 118.500.537,00                              |        | Seksi Kesga dan Gizi                                     |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                         | 3,3%                          | 1   | 22.194.248,00    | 1               | 22.194.248,00    | 1               | 23.531.153,00    | 1               | 24.646.846,00    | 1               | 25.934.041,00    | 1   | 118.500.536,00                              |        | Seksi P2PTM  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus   | Persentase penderita diabetes mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                  | 100%                          | 1   | 27.742.811,00    | 1               | 27.742.811,00    | 1               | 29.413.941,00    | 1               | 30.808.558,00    | 1               | 32.417.552,00    | 1   | 148.125.673,00                              |        |  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  | Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 48,9%                         | 1   | 216.447.859,00   | 1               | 216.447.859,00   | 1               | 229.485.925,00   | 1               | 240.366.646,00   | 1               | 252.919.923,00   | 1   | 1.155.668.212,00                            |        |  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | Persentase orang terduga TB yang mendapat pemeriksaan TB sesuai standar                             | 13,78%                        | 1   | 27.743.144,00    | 1               | 27.743.144,00    | 1               | 29.414.294,00    | 1               | 30.808.928,00    | 1               | 32.417.941,00    | 1   | 148.127.451,00                              |        | Seksi P2M  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar        | 46,1%                         | 1   | 154.183.755,00   | 1               | 226.164.583,00   | 1               | 239.787.952,00   | 1               | 251.157.127,00   | 1               | 264.273.943,00   | 1   | 1.135.567.360,00                            |        |  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan pada penduduk pada kondisi KLB                        | N/A                           | 1   | 221.137.379,00   | 1               | 221.137.379,00   | 1               | 222.410.622,00   | 1               | 23.473.187,00    | 1               | 24.699.087,00    | 1   | 712.857.654,00                              |        | Seksi Surveilans dan Imunisasi                           |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana  | N/A                           | 1   | 250.843.450,00   | 1               | 252.843.450,00   | 1               | 256.026.555,00   | 1               | 58.682.968,00    | 1               | 61.747.717,00    | 1   | 880.144.140,00                              |        |  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Persentase pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat                                 | 100%                          | 1   | 637.392.472,00   | 1               | 637.392.472,00   | 1               | 675.786.780,00   | 1               | 707.828.165,00   | 1               | 744.794.871,00   | 1   | 3.403.194.760,00                            |        | Seksi Kesga dan Gizi                                     |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan terbinas di Masyarakat  | 20 Puskesmas                  | 20 Puskesmas                                  | 116.519.806,00   | 30 Pos UKK      | 116.519.806,00   | 30 Pos UKK      | 123.538.554,00   | 30 Pos UKK      | 129.395.944,00   | 30 Pos UKK      | 136.153.717,00   | 30 Pos UKK  | 622.127.827,00                              |        | Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga |
|        |         |      |   | Jumlah Petugas yang dilatih program kesehatan olah raga dengan BTT                                  |                               |   |                  | 20 orang  |   |        |  |
|        |         |      |   | Jumlah Kelompok/ komunitas olahraga yang terlatih dan terbinas kesehatan olahraga dengan BTT        |                               |   |                  | 60 Kelompok   |   |        |  |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Jumlah desa yang melaksanakan STBM  | 19 desa/ nagari               | 19 desa/ nagari                               | 216.393.870,00   | 19 desa/ nagari | 216.393.926,00   | 19 desa/ nagari | 229.428.744,00   | 19 desa/ nagari | 240.306.754,00   | 19 desa/ nagari | 252.856.903,00   | 19 desa/ nagari   | 1.155.380.197,00                            |        |  |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)  | Data Capaian Awal Perencanaan   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                      |                                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi                          |   |   |               |
|--------|---------|------|---|---|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------|
|        |         |      |   |   |                                 | Tahun-1                                       |                                 | Tahun-2              |                                 | Tahun-3              |                                 | Tahun-4              |                                 | Tahun-5              |                                 |   |                                 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |   |               |
|        |         |      |   |   |                                 | Target  | Rp                              | Target               | Rp                              | Target               | Rp                              | Target               | Rp                              | Target               | Rp                              |   |                                 | Target  | Rp  |               |
|        |         |      |   | Jumlah fasyankes yang memiliki pengelahan limbah medis  | 23 fasyankes                    | 23 fasyankes                                  | 23 fasyankes                    | 23 fasyankes         | 23 fasyankes                    | 23 fasyankes         | 23 fasyankes                    | 23 fasyankes         | 23 fasyankes                    | 23 fasyankes         | -                               |   |                                 |   |   |               |
|        |         |      |   | Jumlah sarana air minum diawasi   | 200 sarana air minum            | 200 sarana air minum                          | 200 sarana air minum            | 200 sarana air minum | 200 sarana air minum            | 200 sarana air minum | 200 sarana air minum            | 200 sarana air minum | 200 sarana air minum            | 200 sarana air minum | -                               |   |                                 |   |   |               |
|        |         |      |   | Jumlah fasilitas umum diawasi   | 100 TTU                         | 100 TTU                                       | 100 TTU                         | 100 TTU              | 100 TTU                         | 100 TTU              | 100 TTU                         | 100 TTU              | 100 TTU                         | 100 TTU              | -                               |   |                                 |   |   |               |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Jumlah Sarana Promosi Kesehatan yang tersebar di Kabupaten Pasaman Barat  | 20                              | 20  | 250.912.931,00                  | 20                   | 250.912.931,00                  | 20                   | 290.121.664,00                  | 20                   | 722.842.716,00                  | 20                   | Puskesmas                       | 760.593.565,00                              | 20                              | Puskesmas   | 2.275.383.807,00  | Seksi Promkes |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah kelompok ASMAN yang dibina masing masing Puskesmas   | 40 orang                        | 40 orang                                      | 83.228.433,00                   | 40 Kelompok          | 83.228.433,00                   | 40 orang             | 88.241.825,00                   | 40 orang             | 92.425.674,00                   | 40 orang             | 97.252.655,00                   | 40 orang                                    | 444.377.020,00                  |   | Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional                   |               |
|        |         |      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | - Ketepatan laporan W2 (SKDR)   | 80%                             | 3 kegiatan                                    | 421.690.839,00                  | 80%                  | 421.690.839,00                  | 3 kegiatan           | 447.092.030,00                  | 3 kegiatan           | 468.290.207,00                  | 3 kegiatan           | 492.746.915,00                  | 3 kegiatan                                  | 2.251.510.830,00                |   | Seksi Surveilans dan Imunisasi                          |               |
|        |         |      |   | - Penemuan kasus AFP yang dibuktikan bukan karena polio (Non Polio AFP Rate)  | ≥ 2/100.000 anak usia: 15 tahun |   | ≥ 2/100.000 anak usia: 15 tahun |                      | ≥ 2/100.000 anak usia: 15 tahun |                      | ≥ 2/100.000 anak usia: 15 tahun |                      | ≥ 2/100.000 anak usia: 15 tahun |                      | ≥ 2/100.000 anak usia: 15 tahun |   | ≥ 2/100.000 anak usia: 15 tahun |   |   |               |
|        |         |      |   | - Penemuan kasus demam-ruam yang dibuktikan secara laboratorium bukan karena campak-rubella (Discarded Rate)                          | ≥ 2/100.000 penduduk            |   | ≥ 2/100.000 penduduk            |                      | ≥ 2/100.000 penduduk            |                      | ≥ 2/100.000 penduduk            |                      | ≥ 2/100.000 penduduk            |                      | ≥ 2/100.000 penduduk            |   | ≥ 2/100.000 penduduk            |   |   |               |
|        |         |      |   | - Jumlah Desa UCI   | 80%                             |   | 80%                             |                      | 80%                             |                      | 80%                             |                      | 80%                             |                      | 80%                             |   | 80%                             |   |   |               |
|        |         |      |   | - Persentase IDL  | 95%                             |   | 95%                             |                      | 95%                             |                      | 95%                             |                      | 95%                             |                      | 95%                             |   | 95%                             |   |   |               |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                      | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)  | N/A                             | 1 kegiatan                                    | -                               | 1 kegiatan           | 21.137.379,00                   | 1 kegiatan           | 22.410.622,00                   | 1 kegiatan           | 23.473.187,00                   | 1 kegiatan           | 24.699.087,00                   | 1 kegiatan                                  | 91.720.275,00                   |   | Seksi P2PTM   |               |
|        |         |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA  | Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan IPWL   | N/A                             | 20 Puskesmas                                  | -                               | 20 Puskesmas         | 21.137.379,00                   | 20 Puskesmas         | 22.410.622,00                   | 20 Puskesmas         | 23.473.187,00                   | 20 Puskesmas         | 24.699.087,00                   | 20 Puskesmas                                | 91.720.275,00                   |   |   |               |
|        |         |      | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  | Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan | 1 paket kegiatan                | 1 paket kegiatan                              | 554.856.240,00                  | 1 badan/ lembaga     | 554.856.240,00                  | 1 badan/ lembaga     | 588.278.832,00                  | 1 badan/ lembaga     | 616.171.164,00                  | 1 badan/ lembaga     | 648.351.033,00                  | 1 badan/ lembaga                            | 2.962.513.509,00                |   |   |               |
|        |         |      | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                | Jumlah Kegiatan Upaya Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan   | N/A                             | 2 kegiatan                                    | -                               | 2 kegiatan           | 21.137.379,00                   | 2 kegiatan           | 22.410.622,00                   | 2 kegiatan           | 23.473.187,00                   | 2 kegiatan           | 24.473.187,00                   | 2 kegiatan                                  | 91.494.375,00                   |   | Seksi Surveilans dan Imunisasi                          |               |
|        |         |      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kesehatan PENYAKIT Menular dan Tidak Menular memutar dan tidak memutar                    | 20 Puskesmas                    | 51 kali                                       | 27.659.583,00                   | 50 kali              | 27.659.583,00                   | 50 kali              | 29.325.700,00                   | 50 kali              | 30.716.133,00                   | 50 kali              | 32.320.300,00                   | 50 kali                                     | 147.681.299,00                  |   | Bidang P2P  |               |
|        |         |      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Jumlah Masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan Sumber Sakato dan Jaminan Kesehatan Tual Basamo                                  | 36907 jiwa                      | 36907 jiwa                                    | 14.565.826.368,00               | 36907 jiwa           | 15.565.826.368,00               | 36907 jiwa           | 16.503.457.658,00               | 36907 jiwa           | 17.285.943.589,00               | 36907 jiwa           | 18.188.711.268,00               | 36907 jiwa                                  | 82.109.765.251,00               |   | Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan |               |
|        |         |      | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                      | Jumlah sekolah yang melaksanakan deteksi dini NAPZA   | 2 kegiatan                      | 2 kegiatan                                    | 22.194.248,00                   | 20 sekolah           | 22.194.248,00                   | 20 sekolah           | 23.531.153,00                   | 20 sekolah           | 24.646.846,00                   | 20 sekolah           | 25.934.041,00                   | 20 sekolah                                  | 118.500.536,00                  |   | Seksi P2PTM   |               |
|        |         |      |   | Jumlah OPD yang tersosialisasi tentang Perda KTR n.05 tahun 2020  |                                 |   |                                 | 20 OPD                                      |                                 |   |   |               |
|        |         |      | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional    | Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan /Nasional  | N/A                             | 12 kegiatan                                   | -                               | 12 kegiatan          | 20.130.837,00                   | 12 kegiatan          | 21.343.449,00                   | 12 kegiatan          | 22.355.416,00                   | 12 kegiatan          | 23.748.843,00                   | 12 kegiatan                                 | 87.578.545,00                   |   | Seksi Surveilans dan Imunisasi                          |               |
|        |         |      | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  | Jumlah pembinaan kawasan sehat  | 11 kecamatan                    | 11 kecamatan                                  | 27.742.811,00                   | 11 kecamatan         | 27.742.811,00                   | 11 kecamatan         | 29.413.941,00                   | 11 kecamatan         | 30.808.558,00                   | 11 kecamatan         | 32.417.552,00                   | 11 kecamatan                                | 148.125.673,00                  |   | Seksi Promkes   |               |
|        |         |      | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah penyediaan telemedicine di fasyankes   | N/A                             | 1 paket                                       | -                               | 1 paket/ Unit        | 528.434.497,00                  | 1 paket/ Unit        | 560.265.554,00                  | 1 paket/ Unit        | 586.829.680,00                  | 1 paket/ Unit        | 617.477.175,00                  | 1 paket/ Unit                               | 2.293.006.906,00                |   | Seksi Pelayanan Kesehatan Primer                        |               |
|        |         |      | Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | Persentase terpeñuhnya dukungan operasional RS tipe D   | N/A                             | 1 paket                                       | 221.942.488,00                  | 100                  | 221.942.488,00                  | 100                  | 235.311.533,00                  | 100                  | 246.468.465,00                  | 100                  | 259.340.413,00                  | 100   | 1.185.005.387,00                |   |   |               |
|        |         |      |   | Pengadaan alat dan Perlengkapan untuk penunjang rumah sakit tipe D Ujung Gading   |                                 |   |                                 | 90 unit                                     |                                 |   |   |               |

| Tujuan | Sasaran | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi                                |    |
|--------|---------|--------------|---|--|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---|---|---------------------------------------|----|
|        |         |              |   |  |                               | Tahun-1                                       |                   | Tahun-2      |                   | Tahun-3      |                   | Tahun-4      |                   | Tahun-5      |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |   |                                       |    |
|        |         |              |   |  |                               | Target  | Rp                | Target       | Rp                | Target       | Rp                | Target       | Rp                | Target       | Rp                | Target  |   |                                       | Rp |
|        |         |              | Operasional Pelayanan Puskesmas   | Jumlah pemenuhan operasional pelayanan Puskesmas   | 20 Puskesmas                  | 20 Puskesmas                                  | 12.137.488.762,00 | 20 Puskesmas | 12.137.488.762,00 | 20 Puskesmas | 12.868.608.909,00 | 20 Puskesmas | 13.478.754.105,00 | 20 Puskesmas | 14.182.689.271,00 | 20 Puskesmas  | 64.805.029.809,00                           | Bidang Yankes                         |    |
|        |         |              | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Pelaksanaan kegiatan operasional IFK   | 100%                          | 1   | 347.308.034,00    | 12 bulan     | 347.308.034,00    | 12 bulan     | 355.728.206,00    | 12 bulan     | 362.755.132,00    | 12 bulan     | 370.862.220,00    | 12 bulan  | 1.783.961.626,00                            | IFK                                   |    |
|        |         |              | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Pelaksanaan kegiatan operasional Labkesda  | N/A                           | 1 kegiatan                                    |                   | 12 bulan  |   | Labkesda                              |    |
|        |         |              | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota  | Jumlah Puskesmas yang dilakukan Re Akreditasi  | 20 Puskesmas                  | 20 Puskesmas                                  | 1.462.402.363,00  | 20 Puskesmas | 1.462.402.363,00  | 20 Puskesmas | 1.550.492.399,00  | 20 Puskesmas | 1.624.006.599,00  | 20 Puskesmas | 1.708.821.216,00  | 20 Puskesmas  | 7.808.124.940,00                            | Seksi Pelayanan Kesehatan Primer      |    |
|        |         |              | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)                                 | Jumlah Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi   | 2 kegiatan                    | 2 kegiatan                                    | 27.742.811,00     | 5 Orang      | 27.742.811,00     | 5 Orang      | 29.413.941,00     | 5 Orang      | 30.808.558,00     | 5 Orang      | 32.417.552,00     | 5 Orang   | 148.125.673,00                              | Seksi Surveilans dan Imunisasi        |    |
|        |         |              | Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah   | Persentase kewaspadaan diri dan respon wabah yang dilaksanakan   | N/A                           | 1   | -                 | 1            | 21.137.379,00     | 1            | 22.410.622,00     | 1            | 23.473.187,00     | 1            | 24.699.087,00     | 1   | 91.720.275,00                               |                                       |    |
|        |         |              | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)  | Terpenuhinya dukungan pelayanan Public Safety Centre (PSC) 119   | 1 Paket                       | 1 Paket                                       | 2.153.396.997,00  | 12 bulan     | 2.153.396.997,00  | 12 bulan     | 2.283.110.149,00  | 12 bulan     | 2.391.360.287,00  | 12 bulan     | 2.516.250.362,00  | 12 bulan  | 11.497.514.792,00                           | Bidang Yankes                         |    |
|        |         | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki Sistem Informasi terintegrasi dengan SIM yang sesuai standar di Lingkungan Dinas Kesehatan  | 0 Faskes                      | 11 Faskes                                     | 172.654.400,00    | 5 Faskes     | 180.993.072,00    | 6 Faskes     | 191.895.466,00    | 6 Faskes     | 200.993.892,00    | 3 Faskes     | 211.490.906,00    | 21 Faskes   | 958.027.736,00                              | Dinas Kesehatan                       |    |
|        |         |              | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat  | 100%                          | 1   | 40.000.000,00     | 1            | 96.644.635,00     | 1            | 102.466.173,00    | 1            | 107.324.447,00    | 1            | 112.929.524,00    | 1   | 459.364.779,00                              | Sub bag. Program, Informasi dan Humas |    |
|        |         |              | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan sistem informasi kesehatan  | 100%                          | 1   | 76.009.765,00     | 5            | 84.348.437,00     | 6            | 89.429.293,00     | 6            | 64.327.961,00     | 3            | 67.687.523,00     | 21  | 381.802.979,00                              |                                       |    |
|        |         |              | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet   | Jumlah pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet   | N/A                           | 11 Unit/ Paket                                | 56.644.635,00     | -            | -                 | -            | -                 | -            | 29.341.484,00     | -            | 30.873.859,00     | -   | 116.859.978,00                              |                                       |    |
|        |         | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Cakupan Pengawasan dan pengendalian serta operasional Rumah Sakit Tipe D di lingkungan Dinas Kesehatan   | 100                           | 100   | 432.432.762,00    | 100          | 465.592.076,00    | 100          | 205.795.204,00    | 100          | 214.403.369,00    | 100          | 231.744.818,00    | 100   | 1.549.968.229,00                            | Dinas Kesehatan                       |    |
|        |         |              | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Cakupan Pengawasan dan pengendalian serta operasional Rumah Sakit Tipe D di lingkungan Dinas Kesehatan   | N/A                           | 100   | 122.103.545,00    | 100          | 134.103.545,00    | 100          | 28.334.250,00     | 4 kegiatan   | 29.519.438,00     | 4 kegiatan   | 31.907.039,00     | 4 kegiatan  | 345.967.817,00                              | Bidang Yankes                         |    |
|        |         |              | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | Cakupan Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten  | N/A                           | 100   | 130.001.682,00    | 100          | 141.050.996,00    | 100          | 26.985.000,00     | 2 kegiatan   | 28.113.750,00     | 2 kegiatan   | 30.387.656,00     | 2 kegiatan  | 356.539.084,00                              |                                       |    |
|        |         |              | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  | Peningkatan Kapasitas P Care di Puskesmas  | 1                             | 1   | 180.327.535,00    | 40           | 190.437.535,00    | 40           | 150.475.954,00    | 40           | 156.770.181,00    | 40           | 169.450.123,00    | 40  | 847.461.328,00                              |                                       |    |
|        |         |              |   | Peningkatan Kapasitas Pengelola BLUD UPT Puskesmas   |                               |   |                   | 20           |                   | 20           |                   | 20           |                   | 20           |                   | 20  |   |                                       |    |
|        |         | 1.02.03      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Cakupan SDM yang memiliki kompetensi   | 35 %                          | 45 %  | 3.636.755.050,00  | 55 %         | 4.000.430.555,00  | 65 %         | 4.400.473.611,00  | 75 %         | 4.840.520.972,00  | 75 %         | 5.324.573.069,00  | 75 %  | 22.202.753.257,00                           |                                       |    |
|        |         | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota   | Jumlah Rekomendasi teknis Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan serta tindak lanjut atas perizinanpraktik Tenaga kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat | 100                           | 100   | 46.250.000,00     | 100          | 50.990.625,00     | 100          | 56.089.687,00     | 100          | 61.838.882,00     | 100          | 68.584.939,00     | 100   | 283.754.133,00                              | Dinas Kesehatan                       |    |
|        |         |              | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan   | Jumlah izin praktik tenaga kesehatan yang dilakukan pengawasan dan pengendalian  | N/A                           | 2 kegiatan                                    | 21.050.000,00     | 2 kegiatan   | 22.050.000,00     | 2 kegiatan   | 24.255.000,00     | 2 kegiatan   | 26.741.140,00     | 2 kegiatan   | 29.658.352,00     | 2 kegiatan  | 123.754.492,00                              | Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan   |    |
|        |         |              | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                      | Jumlah rekomendasi pemberian izin praktik tenaga kesehatan dan sarana kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan   | 4 kegiatan                    | 100   | 25.200.000,00     | 100          | 28.940.625,00     | 4 kegiatan   | 31.834.687,00     | 4 kegiatan   | 35.097.742,00     | 4 kegiatan   | 38.926.587,00     | 4 kegiatan  | 159.999.641,00                              |                                       |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode         | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi            |  |    |
|--------|---------|--------------|--|--|-------------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---|-------------------|--|----|
|        |         |              |  |  |                               | Tahun-1                                       |                  | Tahun-2    |                  | Tahun-3    |                  | Tahun-4    |                  | Tahun-5    |                  |   |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah      |    |
|        |         |              |  |  |                               | Target  | Rp               | Target     | Rp               | Target     | Rp               | Target     | Rp               | Target     | Rp               |   |                   | Target   | Rp |
|        |         | 1.02.03.2.02 | Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota   | Cakupan pemerataan sumber manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Fasilitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan  | 100 %                         | 100 %   | 3.055.340.000,00 | 100 %      | 3.359.420.463,00 | 100 %      | 3.695.362.510,00 | 100 %      | 4.067.472.624,00 | 100 %      | 4.475.392.375,00 | 100 %                                       | 18.652.987.972,00 | Dinas Kesehatan  |    |
|        |         |              | Perencanaan dan Distribusi serta Perneratan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Dalam Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan buku profil SDMK sumber daya manusia kesehatan  | 1 kegiatan                    | 1 kegiatan                                    | 20.090.010,00    | 2 dok      | 23.090.010,00    | 1 kegiatan | 25.399.010,00    | 1 kegiatan | 27.956.602,00    | 1 kegiatan | 30.760.321,00    | 1 kegiatan                                  | 127.295.953,00    | Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan                              |    |
|        |         |              | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar   | Tersedianya fasilitas tempat tinggal untuk tenaga kesehatan nusantara sehat  | 1                             | 1   | 3.014.339.505,00 | 1 Unit     | 3.314.339.968,00 | 1 Unit     | 3.645.773.965,00 | 1          | 4.012.890.687,00 | 1          | 4.415.336.510,00 | 1   | 18.402.680.635,00 |  |    |
|        |         |              |  | Penyaluran Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan Dinas Kesehatan   |                               |   |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |   |                   |  |    |
|        |         |              | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan   | N/A                           | 4 kegiatan                                    | 20.910.485,00    | 4 kegiatan | 21.990.485,00    | 4 kegiatan | 24.189.535,00    | 4 kegiatan | 26.625.335,00    | 4 kegiatan | 29.295.544,00    | 4 kegiatan                                  | 123.011.384,00    |  |    |
|        |         | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi teknis sesuai standar  | 25                            | 25  | 535.165.050,00   | 25         | 590.019.467,00   | 25         | 649.021.414,00   | 25         | 711.209.466,00   | 25         | 780.595.755,00   | 150   | 3.266.011.152,00  | Dinas Kesehatan  |    |
|        |         |              | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan tenaga fungsional kesehatan  | 25                            | 25  | 535.165.050,00   | 2 kali     | 590.019.467,00   | 25         | 649.021.414,00   | 25         | 711.209.466,00   | 25         | 780.595.755,00   | 25  | 3.266.011.152,00  | Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Seksi Pelayanan Kefarmasian |    |
|        |         | 1.02.04      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  | Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan   | 35 %                          | 45 %  | 294.305.540,00   | 55 %       | 323.736.094,00   | 65 %       | 368.215.153,00   | 70 %       | 391.720.674,00   | 75 %       | 430.892.741,00   | 75 %  | 1.808.870.202,00  |  |    |
|        |         | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi yang beroperasi sesuai standar dan peraturan yang berlaku  | 17 Sarana                     | 25 Sarana                                     | 37.221.440,00    | 25 Sarana  | 57.101.871,00    | 25 Sarana  | 45.200.307,00    | 25 Sarana  | 49.472.645,00    | 25 Sarana  | 54.345.507,00    | 25 Sarana                                   | 243.341.770,00    | Dinas Kesehatan  |    |
|        |         |              | Pengendalian dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi yang beroperasi sesuai standar dan peraturan yang berlaku  | 17 Sarana                     | 25 Sarana                                     | 37.221.440,00    | 25 Sarana  | 57.101.871,00    | 25 Sarana  | 45.200.307,00    | 25 Sarana  | 49.472.645,00    | 25 Sarana  | 54.345.507,00    | 25 Sarana                                   | 243.341.770,00    | Seksi Pelayanan Kefarmasian                                      |    |
|        |         | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga   | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tidak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 12 kali                       | 12 kali                                       | 37.800.000,00    | 12 kali    | 57.947.400,00    | 12 kali    | 57.947.400,00    | 12 kali    | 50.321.959,00    | 12 kali    | 55.365.094,00    | 12 kali                                     | 259.381.853,00    | Dinas Kesehatan  |    |
|        |         |              | Pengendalian dan Pengawasan serta tidak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga  | Peningkatan kapasitas petugas ASPAK Puskesmas  | 12 kali                       | 12 kali                                       | 37.800.000,00    | 40 orang   | 57.947.400,00    | 40 orang   | 57.947.400,00    | 12 kali    | 50.321.959,00    | 12 kali    | 55.365.094,00    | 12 kali                                     | 259.381.853,00    | Seksi Alat Kesehatan dan PKRT                                    |    |
|        |         |              |  | Pelaksanaan Pengawasan Optik   |                               |   |                  | 4 kali     |                  | 4 kali     |                  |            |                  |            |                  |   |                   |  |    |
|        |         | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  | Jumlah Pengawasan Terhadap Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)   | 30                            | 30  | 102.632.250,00   | 30         | 156.257.601,00   | 30         | 124.240.958,00   | 30         | 136.631.107,00   | 30         | 150.323.921,00   | 180   | 670.085.837,00    | Dinas Kesehatan  |    |
|        |         |              | Pengendalian dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Pengawasan Terhadap Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)   | 1 kegiatan                    | 30  | 102.632.250,00   | 30         | 156.257.601,00   | 30         | 124.240.958,00   | 30         | 136.631.107,00   | 30         | 150.323.921,00   | 180   | 670.085.837,00    | Seksi Pelayanan Kefarmasian                                      |    |

| Tujuan   | Sasaran   | Kode         | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |                   |                      |                   |                       |                   |                       |                   |   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi   |    |
|--|---|--------------|--|--|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|---|--|----|
|  |   |              |  |  |                               | Tahun-1                                       |                   | Tahun-2              |                   | Tahun-3              |                   | Tahun-4               |                   | Tahun-5               |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |   |  |    |
|  |   |              |  |  |                               | Target  | Rp                | Target               | Rp                | Target               | Rp                | Target                | Rp                | Target                | Rp                | Target  |   |  | Rp |
|  |   | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higienitas Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap TPM dan DAM   | 100 %                         | 100 %   | 31.500.000,00     | 100 %                | 47.958.750,00     | 100 %                | 38.027.981,00     | 100 %                 | 41.934.965,00     | 100 %                 | 46.137.578,00     | 100 %   | 205.559.274,00                              | Dinas Kesehatan  |    |
|  |   |              | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higienitas Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higienitas | 100%                          | 1   | 31.500.000,00     | 100                  | 47.958.750,00     | 100                  | 38.027.981,00     | 100                   | 41.934.965,00     | 100                   | 46.137.578,00     | 100   | 205.559.274,00                              | Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga |    |
|  |   |              |  | Jumlah Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higienitas           |                               |   |                   | 150                  |                   | 150                  |                   | 150                   |                   | 150                   |                   | 150   |   |  |    |
|  |   | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga   | Jumlah Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Diawasi   | 26 Sampel                     | 26 Sampel                                     | 85.151.850,00     | 26 Sampel            | 4.470.472,00      | 26 Sampel            | 102.798.507,00    | 26 Sampel             | 113.359.998,00    | 26 Sampel             | 124.720.641,00    | 156 Sampel  | 430.501.468,00                              | Dinas Kesehatan  |    |
|  |   |              | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan  | Jumlah Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Diawasi   | 17 Sampel                     | 26 Sampel                                     | 85.151.850,00     | 26 Sampel            | 4.470.472,00      | 26 Sampel            | 102.798.507,00    | 26 Sampel             | 113.359.998,00    | 26 Sampel             | 124.720.641,00    | 156 Sampel  | 430.501.468,00                              | Seksi Pelayanan Kefarmasian                              |    |
|  | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |              |  | Persentase Rumah Tangga ber-PHBS   | 70 %                          | 70 %  |                   | 70 %                 |                   | 75 %                 |                   | 75 %                  |                   | 75 %                  |                   | 75 %  |   |  |    |
|  |   | 1.02.05      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase RumahTangga ber-PHBS  | 70 %                          | 75 %  | 902.098.050,00    | 75 %                 | 992.307.855,00    | 75 %                 | 1.091.538.641,00  | 75 %                  | 1.200.692.505,00  | 75 %                  | 1.320.761.755,00  | 75 %  | 5.507.398.806,00                            |  |    |
|  |   | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Organisasi/ Masyarakat yang dibina melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan  | 40                            | 40  | 154.288.050,00    | 40                   | 169.417.731,00    | 40                   | 186.280.984,00    | 40                    | 205.398.860,00    | 40                    | 229.734.160,00    | 40  | 945.119.785,00                              | Dinas Kesehatan  |    |
|  |   |              | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Jumlah Organisasi/Masyarakat yang diberdayakan dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang budaya dan keamanan pangan                  | 40                            | 40  | 154.288.050,00    | 40                   | 169.417.731,00    | 40                   | 186.280.984,00    | 40                    | 205.398.860,00    | 40                    | 229.734.160,00    | 40  | 945.119.785,00                              | Seksi Pelayanan Kefarmasian; Seksi Promkes               |    |
|  |   | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat  | 11 Kecamatan                  | 6 Kecamatan                                   | 747.810.000,00    | 11 Kecamatan         | 822.890.124,00    | 11 Kecamatan         | 905.257.657,00    | 11 Kecamatan          | 995.293.645,00    | 11 Kecamatan          | 1.091.027.595,00  | 11 Kecamatan  | 4.562.279.021,00                            | Dinas Kesehatan  |    |
|  |   |              | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   | Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat  | 11 kecamatan                  | 6 kecamatan                                   | 747.810.000,00    | 11 kecamatan         | 822.890.124,00    | 11 kecamatan         | 905.257.657,00    | 11 kecamatan          | 995.293.645,00    | 11 kecamatan          | 1.091.027.595,00  | 11 kecamatan  | 4.562.279.021,00                            | Seksi Promkes  |    |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan |   |              |  | Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan<br>Persentase penurunan Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Dinas Kesehatan       | 2 LEVEL C NILAI 50 %          | 3 LEVEL B NILAI 50 %                          |                   | 3 LEVEL B NILAI 75 % |                   | 3 LEVEL B NILAI 75 % |                   | 3 LEVEL B NILAI 100 % |                   | 3 LEVEL B NILAI 100 % |                   | 3 LEVEL B NILAI 100 %                                       |   |  |    |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan |   |              |  | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan<br>Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan<br>Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan    | C NILAI 2 LEVEL 0 %           | B NILAI 3 LEVEL 50 %                          |                   | B NILAI 3 LEVEL 50 % |                   | B NILAI 3 LEVEL 75 % |                   | B NILAI 3 LEVEL 75 %  |                   | B NILAI 3 LEVEL 100 % |                   | B NILAI 3 LEVEL 100 %                                       |   |  |    |
|  |   | XXX.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Cakupan pelayanan pemjang urusan pemerintahan daerah   | 100 %                         | 100 %   | 65.604.501.193,00 | 100 %                | 65.735.710.195,00 | 100 %                | 65.867.181.616,00 | 100 %                 | 65.998.915.979,00 | 100 %                 | 66.130.913.811,00 | 100 %   | 0   |  |    |
|  |   | XXX.01.2.01  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | umlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja (pelaporan) program dan kegiatan Dinas Kesehatan  | 12 Dokumen                    | 13 Dokumen                                    | 71.835.645,00     | 13 Dokumen           | 72.410.330,00     | 13 Dokumen           | 74.050.876,00     | 13 Dokumen            | 74.842.864,00     | 13 Dokumen            | 70.726.507,00     | 77 Dokumen  | 363.866.222,00                              | Dinas Kesehatan  |    |
|  |   |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun  | 5 dokumen                     | 7 dokumen                                     | 46.321.508,00     | 7 dokumen            | 47.317.888,00     | 7 dokumen            | 48.389.934,00     | 7 dokumen             | 48.907.474,00     | 7 dokumen             | 46.217.563,00     | 40 Dokumen  | 237.154.367,00                              | Sub bag. Program, Informasi dan Humas                    |    |
|  |   |              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun   | 2 dokumen                     | 6 dokumen                                     | 25.514.137,00     | 6 dokumen            | 25.092.442,00     | 6 dokumen            | 25.660.942,00     | 6 dokumen             | 25.935.390,00     | 6 dokumen             | 24.508.944,00     | 32 dokumen  | 126.711.855,00                              |  |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode        | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                    | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |   |                    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------|---|--------|
|        |         |             |  |   |                               | Tahun-1                                       |                   | Tahun-2      |                   | Tahun-3      |                   | Tahun-4      |                   | Tahun-5      |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                    |   |        |
|        |         |             |  |   |                               | Target  | Rp                | Target       | Rp                | Target       | Rp                | Target       | Rp                | Target       | Rp                | Target  | Rp                 |   |        |
|        |         | XXX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Dinas Kesehatan                         | 100 %                         | 100 %   | 63.667.024.816,00 | 100 %        | 63.782.734.007,00 | 100 %        | 63.875.604.579,00 | 100 %        | 63.973.298.652,00 | 100 %        | 64.232.202.466,00 | 100 %   | 319.530.864.520,00 | Dinas Kesehatan                             |        |
|        |         |             | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                | Penyalaran Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan   | 732 PNS dan 20 PJK            | 14 Bulan                                      | 57.425.066.600,00 | 14 Bulan     | 57.520.776.600,00 | 14 Bulan     | 57.604.529.479,00 | 14 Bulan     | 57.692.632.302,00 | 14 Bulan     | 57.926.117.880,00 | 14 Bulan  | 288.169.122.861,00 | Sub bag. Keuangan dan Pengelolaan Aset      |        |
|        |         |             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Penyalaran Honor/ Jasa Honor Daerah Tenaga Harian Lepas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat | 294 orang/ 100%               | 13 Bulan                                      | 5.829.398.989,00  | 13 Bulan     | 5.849.398.980,00  | 13 Bulan     | 5.857.915.968,00  | 13 Bulan     | 5.866.875.315,00  | 13 Bulan     | 5.890.618.914,00  | 13 Bulan  | 29.294.208.166,00  |   |        |
|        |         |             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penyalaran Honor Penatausahaan dan Pengelola Keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat   | 12 bulan/ 100%                | 12 bulan                                      | 412.559.227,00    | 12 bulan     | 412.558.427,00    | 12 bulan     | 413.159.132,00    | 12 bulan     | 413.791.035,00    | 12 bulan     | 415.465.672,00    | 12 bulan  | 2.067.533.493,00   |   |        |
|        |         | XXX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Dinas Kesehatan  | 45 Unit                       | 45 Unit                                       | 607.566.750,00    | 45 Unit      | 612.427.284,00    | 45 Unit      | 618.983.965,00    | 45 Unit      | 625.472.818,00    | 45 Unit      | 604.999.695,00    | 270 Unit  | 2.962.880.912,00   | Dinas Kesehatan                             |        |
|        |         |             | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Penyalaran Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Kesehatan                                      | 12 bulan/ 100%                | 12 bulan                                      | 147.751.700,00    | 12 bulan     | 166.031.208,00    | 12 bulan     | 169.792.853,00    | 12 bulan     | 173.515.584,00    | 12 bulan     | 161.769.913,00    | 12 bulan  | 818.861.258,00     | Sub bag. Hukum, Kepegawaian dan Umum        |        |
|        |         |             | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                           | Jumlah barang milik daerah yang dikelola/ dilakukan pemeliharaan oleh dinas kesehatan                         | 30 Unit/ 100%                 | 30 Unit                                       | 353.245.450,00    | 40 Unit      | 446.396.076,00    | 40 Unit      | 449.191.112,00    | 40 Unit      | 451.957.234,00    | 40 Unit      | 443.229.782,00    | 40 Unit   | 2.144.019.654,00   |   |        |
|        |         |             | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                           | Jumlah barang milik daerah yang dikelola/ dilakukan pemeliharaan oleh dinas kesehatan (IFK)                   | 1                             | 1   | 106.569.600,00    | 5 Unit       |                   | 5 Unit       |                   | 5 Unit       |                   | 5 Unit       |                   | 5 Unit  |                    | IFK   |        |
|        |         | XXX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah peserta Diklat/ Bimtek   | 150 Orang                     | 150 Orang                                     | 74.720.000,00     | 150 Orang    | 75.317.760,00     | 150 Orang    | 77.024.178,00     | 150 Orang    | 77.847.966,00     | 150 Orang    | 73.384.683,00     | 900 Orang   | 378.294.587,00     | Dinas Kesehatan                             |        |
|        |         |             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi                         | N/A                           | 6 orang PNS                                   | 20.160.000,00     | 6 orang PNS  | 20.160.000,00     | 6 orang PNS  | 20.616.750,00     | 6 orang PNS  | 20.837.250,00     | 6 orang PNS  | 19.642.581,00     | 6 orang PNS   | 101.416.581,00     | Sub bag. Hukum, Kepegawaian dan Umum        |        |
|        |         |             | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan  | N/A                           | 72 orang PNS                                  | 26.981.880,00     | 72 orang PNS | 27.578.880,00     | 72 orang PNS | 28.203.714,00     | 72 orang PNS | 28.505.358,00     | 72 orang PNS | 26.871.051,00     | 72 orang PNS  | 138.140.883,00     |   |        |
|        |         |             | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                          | N/A                           | 72 orang PNS                                  | 27.578.120,00     | 72 orang PNS | 27.578.880,00     | 72 orang PNS | 28.203.714,00     | 72 orang PNS | 28.505.358,00     | 72 orang PNS | 26.871.051,00     | 72 orang PNS  | 138.737.123,00     |   |        |
|        |         | XXX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor                                  | 100 %                         | 100 %   | 795.438.203,00    | 100 %        | 801.801.709,00    | 100 %        | 816.459.646,00    | 100 %        | 828.737.235,00    | 100 %        | 778.322.387,00    | 100 %   | 4.020.759.180,00   | Dinas Kesehatan                             |        |
|        |         |             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Cakupan ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dinas kesehatan  | 1 paket                       | 100 %   | 227.594.975,00    | 100          | 227.519.035,00    | 100          | 282.592.430,00    | 100          | 286.841.940,00    | 100 %        | 269.392.389,00    | 100 %   | 1.343.940.769,00   | Sub bag. Hukum, Kepegawaian dan Umum        |        |
|        |         |             |  | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas kesehatan  |                               | 15 unit                                       |                   | 20 unit      |                   | 20 unit      |                   | 20 Unit      |                   | 20 Unit      |                   | 95 Unit   | -                  |   |        |
|        |         |             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase penyediaan barang cetakan dan pengadaan kantor dinas kesehatan                                     | 1 paket                       | 100 %   | 384.900.712,00    | 100 %        | 54.952.128,00     | 100 %        | 55.956.721,00     | 100 %        | 56.798.176,00     | 100 %        | 53.342.954,00     | 100 %   | 605.950.691,00     |   |        |
|        |         |             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Pelaksanaan Rapat dan koordinasi bidang kesehatan yang diikuti  | 12 kali                       | 24 kali                                       | 182.942.516,00    | 24 kali      | 469.330.546,00    | 24 kali      | 477.910.495,00    | 24 kali      | 485.097.119,00    | 24 kali      | 455.587.044,00    | 24 kali   | 2.070.867.720,00   |   |        |
|        |         | XXX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor   | 100 %                         | 100 %   | 387.915.779,00    | 100 %        | 391.019.105,00    | 100 %        | 397.739.746,00    | 100 %        | 404.154.903,00    | 100 %        | 379.568.814,00    | 100 %   | 1.960.398.347,00   | Dinas Kesehatan                             |        |
|        |         |             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor di lingkungan dinas kesehatan          | 100                           | 100   | 367.915.779,00    | 100          | 370.859.105,00    | 100          | 377.233.246,00    | 100          | 383.317.653,00    | 100          | 359.999.163,00    | 100   | 1.859.324.946,00   | Sub bag. Hukum, Kepegawaian dan Umum        |        |
|        |         |             | Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor                            | Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | N/A                           | 100   | 20.000.000,00     | 100          | 20.160.000,00     | 100          | 20.506.500,00     | 100          | 20.837.250,00     | 100          | 19.569.651,00     | 100   | 101.073.401,00     |   |        |

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026**

| No       | Sasaran  | Indikator Sasaran   | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD   | Target Capaian Tiap Tahun |                   |                   |                   |                   |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----------|--|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|          |  |   |   | Tahun 2021 Target         | Tahun 2022 Target | Tahun 2023 Target | Tahun 2024 Target | Tahun 2025 Target | Tahun 2026 Target |  |
| <i>1</i> |  | <i>2</i>  | <i>3</i>  | <i>4</i>                  | <i>5</i>          | <i>6</i>          | <i>7</i>          | <i>8</i>          | <i>9</i>          | <i>10</i>                                |
| 1        | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel pada lingkup OPD Dinkes | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada lingkup OPD Dinkes                | Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan |                           | 50                | 50                | 75                | 75                | 100               | 100                                      |
|          |  | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan   | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan   | C                         | B                 | B                 | B                 | B                 | B                 | B  |
|          |  | Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan                                      | Level Maturitas SPIP Dinas Kesehatan  | 2                         | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 | 3  |
| 2        | Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat                                | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                 | Angka Kematian Ibu (AKI) (dihitung per 100.000 kelahiran hidup)                   | 219                       | 210               | 205               | 200               | 190               | 183               | 175                                      |
|          |  | Angka Kematian Bayi (AKB) (dihitung per 1000 kelahiran hidup)             | Angka Kematian Bayi (AKB) (dihitung per 1000 kelahiran hidup)                     | 12,08                     | 11,5              | 11,3              | 11,2              | 11,1              | 11,0              | 11,0                                     |
|          |  | Prevalensi Stunting   | Prevalensi Stunting   | 20,60                     | 20,60             | 19,00             | 17,00             | 14,00             | 13,50             | 13,00                                    |
|          |  | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan                                   | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan   | 40,36                     | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100                                      |
|          |  | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)  | 54,5                      | 70                | 70                | 70                | 75                | 75                | 75                                       |

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan kesehatan tahunan selama kurun waktu lima tahun. Renstra ini juga dapat digunakan untuk pedoman penilaian atau monitoring program pembangunan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat.

Renstra Dinas Kesehatan ditujukan pula untuk arahan dalam membantu pencapaian Visi Kabupaten Pasaman Barat “*Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera*” yang telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatifnya. Keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan tergantung pada komitmen serta kesungguhan para penyelenggaranya dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan kesehatan tersebut.



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 188.45/526.a/BUP-PASBAR/2021**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021-2026**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Strategis diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Barat Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

**A. Ketua**

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

**B. Sekretaris**

1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

**C. Kelompok Kerja**

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Pasaman Barat sesuai visi dan misi serta sasaran kepala daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;

4. Melaksanakan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
6. Merumuskan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
8. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026;
9. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Strategis;
10. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
11. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 30 September 2021



Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 188.45/516.a/BUP.PASBAR/2021

Tanggal : 30 September 2021

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021-2026**

| Jabatan  | Jabatan Dalam Tim |
|--|-------------------|
| Kepala   | Ketua             |
| Sekretaris   | Koordinator       |
| Kasubag Program Informasi dan Humas  | Anggota           |
| Kasubag Keuangan dan Aset  | Anggota           |
| Kasubag Hukum Kepegawaian dan Umum   | Anggota           |
| Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit                         | Koordinator       |
| Kasi P2M (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular)                    | Anggota           |
| Kasi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | Anggota           |
| Kasi Surveilans dan Imunisasi  | Anggota           |
| Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  | Koordinator       |
| Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan   | Anggota           |
| Kasi Pelayanan Kesehatan Primer  | Anggota           |
| Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional                                       | Anggota           |
| Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  | Koordinator       |
| Kasi Kefarmasian   | Anggota           |
| Kasi Alat Kesehatan dan PKRT   | Anggota           |
| Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Anggota           |
| Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat   | Koordinator       |
| Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga                    | Anggota           |
| Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat                                | Anggota           |
| Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat                                   | Anggota           |

